

336.22

Suy
p. 21

**PENGARUH SIKAP WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(STUDI EMPIRIS DI WILAYAH KP.PBB SURAKARTA)**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Derajat S-2 Magister Sains Akuntansi



Diajukan Oleh:

Nama : Suyatmin
NIM : C4C001305

Kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER SAINS AKUNTANSI
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2004

Tesis Berjudul

**PENGARUH SIKAP WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(STUDI EMPIRIS DI WILAYAH KP.PBB SURAKARTA)**

Yang disiapkan dan disusun oleh :

Suyatmin
C4C001305

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada tgl 30 Maret 2004
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

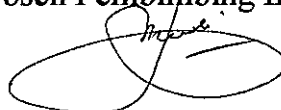
Susunan Tim Penguji

Dosen Pembimbing I



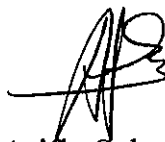
Drs. M.Kholiq Mahfud, Msi
NIP. 131 458 542

Dosen Pembimbing II



Drs. Basuki Hadi P., MBA, MAcc, Akt
NIP. 131 764 490

Anggota Tim



DR. Arifin Sabeni, Mcom, Akt
NIP. 131 696 214



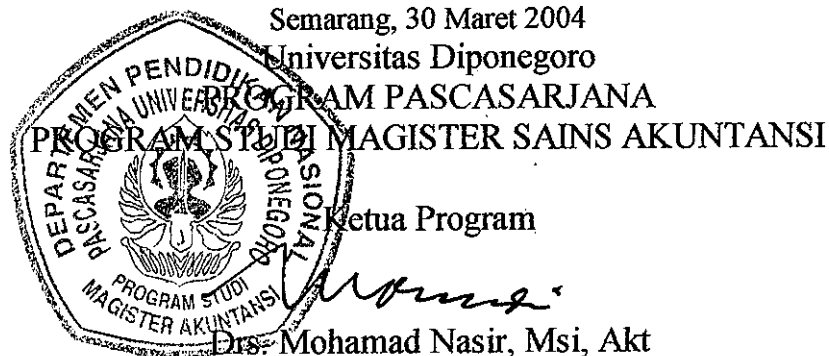
Drs. Sugeng Pamudji, Msi, Akt
NIP. 130 808 733




Dra. Indira Januarti, Msi, Akt
NIP. 131 991 449

Semarang, 30 Maret 2004

Universitas Diponegoro



Ketua Program

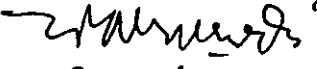

Drs. Mohamad Nasir, Msi, Akt
NIP. 131 875 458



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya ajukan ini merupakan hasil karya saya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari terbukti dan atau dibuktikan bahwa tesis ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi apapun yang akan diberikan kepada saya. Karya ini milik saya dan pertanggung jawabannya sepenuhnya di pundak saya.

Semarang, Maret 2004


Suyatmin

MOTTO & PERSEMBAHAN

MOTTO :

- ❖ *Jangan* lihat masa lampau dengan penyesalan, jangan pula lihat masa depan dengan ketakutan, tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesabaran. (*James Thurber*)
- ❖ Kebesaran suatu persahabatan bukanlah terletak pada sambutan tangan terbuka, senyuman atau suka cita akan persahabatan melainkan inspirasi jiwa yang dirasakan saat menemukan orang yang percaya dan mau dipercayai. (*Kahlil Gibran*)
- ❖ Kegagalan yang menyebabkan tersipu lebih mulia daripada keberhasilan yang membuat sombong. (*Kahlil Gibran*)
- ❖ Sahabat yang sejati adalah orang-orang yang dapat berkata benar denganmu, bukan orang-orang yang dapat membenarkan kata-katamu. (*Hamka*)
- ❖ Tak seorangpun dilahirkan berilmu, karena ilmu itu diperoleh dari belajar. Jadi manusia harus belajar terus menerus. (*Ibnu Mas'ud*)
- ❖ Bukan kebenaran yang membuat manusia menjadi besar, tetapi manusia yang membuat kebenaran menjadi besar. (*Confusius*)

Kupersembahkan kepada:

- Kedua orang tuaku yang melahirkan dan membimbingku.
- Om Samino yang mengarahkan aku.
- Istriku Yayuk yang setia dan memotivasiku untuk selalu menuntut ilmu.
- Anakku Aryani Intan Endah Rahmawati (*Intan*) & Arini Nur Yunia Puspitaningrum Rahmawati (*Ririn*)

ABSTRACT

In the structure of state income, the tax income plays a strategic role and becomes the largest component and domestic resource of income to sustain the finances of government administration and national development. The essential elements of tax success include tax law, tax administration, tax policy, and taxpayer. The problem in this study is whether or not the attitude of taxpayers on land and building (PBB) influences the obedience of taxpayers to pay the PBB in Surakarta Municipality. This study aims to examine the influence of taxpayers on the PBB upon the obedience of the taxpayers to pay it in Surakarta Municipality. Hopefully, the result of this study can make a contribution to Regional Government, in particular, tax collectors. The PBB is a direct tax levied by Central Government. Then, this tax income is distributed in the behalf of community in the area where the taxpayers live.

The population of this study was the taxpayers on land and building in Surakarta Municipality registered in the file of PBB income from 1996 to 2000 issued by Directorate PBB and BPHTB in 2001. The amount of samples included 400 respondents from five sub districts. The kinds of data used were primary and secondary ones. The primary data derived from questionnaires while the other derived from the PBB office in Surakarta Municipality. The method of data collecting was to visit the respondents' houses and they were analyzed with multiple-regression method.

The result of analysis indicates that the obedience of taxpayers as dependent and independent variables that include the attitudes of taxpayers (WP) toward the priority of Regional Development, the PBB fine sanction, the *fiskus* (tax collectors), the sense of nationalism and taxation results in F_{count} at 6.345 and the significant level at $0.00 < 5\%$. It means that the independent variable significantly influences the dependent one. It can be concluded that in fact, the attitudes of taxpayers toward the priority of Regional Development, the PBB fine sanction, the *fiskus* (tax collectors), the sense of nationalism and taxation significantly influence the obedience of taxpayers on PBB in Surakarta Municipality.

Key words: Obedience of taxpayers, attitude of taxpayers

ABSTRAK

Dalam struktur penerimaan negara, penerimaan pajak memiliki peranan yang strategis dan merupakan komponen terbesar serta sumber utama penerimaan dalam negeri untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Elemen penting keberhasilan perpajakan meliputi *tax law, tax administration, tax policy dan tax payer*. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak tidak langsung yang dipungut oleh Pemerintah Pusat. Hasil penerimaan PBB diarahkan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan dengan letak obyek pajak. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah sikap wajib pajak bumi dan bangunan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB di kotamadya Surakarta. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh sikap wajib pajak PBB terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB di kota Surakarta. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan bagi Pemda, khususnya aparat perpajakan.

Populasi penelitian ini adalah wajib pajak PBB di kotamadya Surakarta yang terdaftar dalam buku penerimaan PBB dan BPHTB tahun 1996-2000 yang diterbitkan oleh Direktorat PBB dan BPHTB tahun 2001. Jumlah sampel sebanyak 400 responden yang tersebar dalam 5 (lima) kecamatan. Jenis data adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh dari kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan kota Surakarta. Metode pengumpulan data dengan kunjungan (*visite*) ke rumah responden. Data dianalisis dengan metode regresi berganda.

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat dan sebagai variabel bebas meliputi sikap WP terhadap prioritas pembangunan daerah, sikap WP terhadap sanksi denda PBB, sikap WP terhadap pelayanan fiskus, sikap WP terhadap kesadaran bernegara dan sikap WP terhadap kesadaran perpajakan, menghasilkan F hitung sebesar 6,345 dan tingkat signifikansi 0,00 lebih kecil dari 5%. Hal ini berarti bahwa variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa sikap wajib pajak terhadap prioritas pembangunan daerah, sikap WP terhadap sanksi denda PBB, sikap WP terhadap pelayanan fiskus, sikap WP terhadap kesadaran bernegara dan sikap WP terhadap kesadaran perpajakan telah terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di kota Surakarta.

Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa puji syukur kehadiran Allah, SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dalam upaya memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh derajat sarjana S-2 Program Magister Sains Akuntansi pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Penyusunan dan penulisan tesis ini, banyak bantuan dan dorongan yang diberikan kepada penulis dari berbagai pihak, baik moril maupun materil, bimbingan, pengarahan sejak kuliah awal memasuki kampus Universitas Diponegoro sampai dengan selesainya penulisan tesis ini. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini penulis menghaturkan dan mengucapkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya utamanya kepada Bapak H. Drs. M Kholiq Mahfud, Msi dan Bapak Drs. Basuki Hadi Prayitno, MBA, MAcc, Akt selaku pembimbing, yang telah berupaya untuk membimbing, mengarahkan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dan segalanya, sehingga penulisan tesis ini dapat selesai.

Ucapan terima kasih juga tidak lupa penulis haturkan dan sampaikan kepada Prof. Dochak Latief selaku Rektor UMS dan Bapak Drs. Maryadi, MA selaku Pembantu Rektor I yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk studi lanjut program S-2 .

Demikian pula selama penulisan tesis ini, penulis memperoleh dorongan serta bantuan yang tak ternilai harganya dari berbagai pihak. Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Drs. M. Nasir, Msi, Akt selaku Ketua Program dan Bapak Dr. Jaka Isgiyarsa, Akt selaku Sekretaris Akademik Program Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang, yang telah menyediakan

segalanya termasuk sarana prasarana dan fasilitasnya kepada penulis selama mengikuti pendidikan Program Pascasarjana di Kampus tercinta ini.

2. Bapak Dr. Imam Ghozali, Mcom, Akt dan Bapak Dr. Arifin Sabeni, Mcom, Akt yang telah banyak saya dapatkan saran dan bimbingannya serta teknik proses belajar mengajarnya.
2. Seluruh bapak ibu staf pengajar dan staf pengelola Program Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang yang telah mengantarkan penulis dalam menimba ilmu hingga selesainya studi ini.
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Surakarta dan Stafnya yang telah memberikan ijin penulis untuk pengumpulan data penelitian serta sangat baik hati melayani penulis dengan ramah tamah dalam menyediakan data yang penulis minta.
3. Bapak/Ibu/Sdr responden yang telah bersedia dan meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner yang saya sebarakan semoga amalan kebaikannya diberikan balasan yang berlipat ganda dari Allah, SWT.
4. Rekan – rekan senasib seperjuangan utamanya rekan dari UMS (Pak Agus Endro Suwarno dan Pak Eko Sugiyanto), Pak Drs. Triyono Msi, Cd Dr, Mr Zainal Arifin Menik makasih atas bimbingannya dan juga angkatan VI yang serba kompak selalu setapak demi setapak lama-lama jadi nampak. Terima kasih banyak atas dorongannya. Teman karibku Arfan Iksan, Rahmad Saleh, Fuad, Alex.

Kepada kedua orang tuaku yang telah membesarkanku dan selalu mengiringi do'a setiap langkahku dalam berangkat menuntut ilmu semoga kebaikannya dibalas Allah SWT dan dimasukkan JanahNYA. Teriring do'a khususnya buat istriku Yayuk dan kedua anakku Aryani Intan Endah Rahmawati

(*Intan*) dan Arini Nur Yunia Puspitaningrum Rahmawati (*Ririn*), penulis banyak hutang budi atas do'anya, dorongan dan tulus ikhlasnya hingga menambah semangat dalam menempuh program S-2 ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini tentunya sangat jauh dari sempurna, banyak kelemahan dan kekurangan yang tentu harus dibenahi untuk peneliti selanjutnya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan masukan, kritikan dan saran dari para pembaca demi perbaikan. Namun demikian penulis masih berharap meskipun kecil manfaatnya, mudah-mudahan dapat digunakan secara berkelanjutan, sehingga akan menjadikan manfaat yang semakin besar.

Semarang, Maret 2004

Penulis

Suyatmin

DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
Halaman Judul Penelitian.....	i
Lembar pengesahan Dosen Pembimbing.....	ii
Halaman Pernyataan.....	iii
Halaman Motto dan Persembahan.....	iv
Abstract.....	v
Abstrak.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xiii
Daftar Gambar.....	xv
Daftar Lampiran.....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II. TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS.....	11
2.1. Teori Atribusi (Attribution Theory).....	11
2.2 Teori Pembelajaran Sosial.....	12
2.3 Penelitian Akuntansi Keperilakuan Dalam Bidang Pajak.....	13
2.4 Praktik Pajak Bumi dan Bangunan.....	13
2.5 Hukum dan Peraturan Perpajakan.....	17
2.6 Karakteristik Pajak Bumi dan Bangunan.....	19
2.7 Kepatuhan Wajib Pajak.....	20
2.8 Sikap Wajib Pajak.....	21
2.9 Sikap WP Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah.....	23
2.9.1 Hipotesis 1 (satu).....	23
2.10 Sikap WP Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB.....	23
2.10.1 Hipotesis 2 (dua).....	24
2.11 Sikap WP Terhadap Pelayanan Fiskus.....	24
2.11.1 Hipotesis 3 (tiga).....	25
2.12 Sikap WP Terhadap Kesadaran Bernegara & Perpajakan.....	25

2.12.1	Hipotesis 4 (empat).....	26
2.12.2	Hipotesis 5 (lima).....	26
2.13.	Sikap wajib pajak terhadap pembangunan daerah, sanksi denda PBB, pelayanan Fiskus, kesadaran bernegara dan kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB.....	26
2.14	Penelitian Terdahulu.....	27
2.15	Kerangka Pemikiran Teoritis.....	31
BAB III. METODE PENELITIAN.....		32
3.1	Jenis dan Sumber Data.....	32
3.2	Populasi dan Teknik pengambilan Sampel.....	32
3.3	Prosedur Pengumpulan Data.....	34
3.4	Definisi Operasional & Pengukurannya.....	35
3.5	Identifikasi Variabel.....	36
3.6	Teknik Analisis.....	37
3.6.1	Uji Kualitas Data.....	37
3.6.1.1	Uji Reliabilitas.....	37
3.6.1.2	Uji Validitas.....	38
3.6.1.3	Uji Asumsi Klasik.....	38
3.6.2	Uji Hipotesis.....	40
BAB IV. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN.....		41
4.1.	Gambaran Umum Responden.....	41
4.2.	Profil Responden.....	44
4.3.	Uji Kualitas Data.....	46
4.3.1.	Uji Validitas.....	46
4.3.2.	Uji Reliabilitas.....	47
4.4.	Uji Asumsi Klasik.....	48
4.4.1.	Uji Autokorelasi.....	48
4.4.2.	Uji Multikolonieritas.....	49
4.4.3.	Uji Heteroskedastisitas.....	50
4.4.4.	Uji Normalitas.....	51
4.5.	Hasil Penelitian.....	51
4.6.	Uji Hipotesis.....	52
4.7.	Pembahasan dan Implikasi Hasil Penelitian.....	56

4.7.1. Sikap WP Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah.....	56
4.7.2. Sikap WP Terhadap Sanksi Denda PBB.....	57
4.7.3. Sikap WP Terhadap Pelayanan Fiskus.....	58
4.7.4. Sikap WP Terhadap Kesadaran Bernegara.....	59
4.7.5. Sikap WP Terhadap Kesadaran Perpajakan.....	60
BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI.....	62
5.1. Kesimpulan.....	62
5.2. Keterbatasan penelitian.....	63
5.3. Implikasi.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

<u>No. Tabel</u>	<u>Judul Tabel</u>	<u>Halaman</u>
<i>Tabel 1-1</i>	<i>, Trend Penerimaan Pajak Pereode 1995/1996 s/d 1999/2000</i>	<i>.....4</i>
<i>Tabel 1-2</i>	<i>Penerimaan PBB Dengan Pajak Lainnya Dalam APBN Tahun Anggaran 1990/1991 s/d 2001</i>	<i>.....5</i>
<i>Tabel 2-1</i>	<i>Ringkasan Hasil penelitian Terdahulu</i>	<i>.....30</i>
<i>Tabel 3-1</i>	<i>Penentuan Sampel per Kecamatan</i>	<i>.....34</i>
<i>Tabel 3-2</i>	<i>Identifikasi Variabel Penelitian</i>	<i>.....37</i>
<i>Tabel 4-1</i>	<i>Realisasi Penerimaan PBB dan PDRB Daerah Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Tengah Serta Pertumbuhannya Periode 1996/1997 s/d 1999/2000</i>	<i>.....42</i>
<i>Tabel 4-2</i>	<i>Jumlah Wajib Pajak dan Ketetapan PBB Per Kecamatan di Kota Surakarta Tahun 2002</i>	<i>.....42</i>
<i>Tabel 4-3</i>	<i>Jumlah Tunggakan dan Realisasi Tunggakan PBB Kota Surakarta Tahun 2000 s/d 2002</i>	<i>.....43</i>
<i>Tabel 4-4</i>	<i>Jumlah Tunggakan PBB, Hasil penagihan & Persentase keberhasilan Penagihan Tunggakan PBB Tahun 2001</i>	<i>.....44</i>
<i>Tabel 4-5</i>	<i>Tingkat Pendidikan Responden</i>	<i>.....45</i>
<i>Tabel 4-6</i>	<i>Lama Tinggal Responden di Lokasi Obyek Pajak</i>	<i>.....45</i>
<i>Tabel 4-7</i>	<i>Status Tempat Tinggal Responden</i>	<i>.....46</i>
<i>Tabel 4-8</i>	<i>Hasil Uji Validitas</i>	<i>.....47</i>
<i>Tabel 4-9</i>	<i>Hasil Uji Reliabilitas</i>	<i>.....48</i>
<i>Tabel 4-10</i>	<i>Hasil Uji Durbin Watson (DW)</i>	<i>.....49</i>
<i>Tabel 4-11</i>	<i>Nilai Tolerance dan VIF</i>	<i>.....50</i>
<i>Tabel 4-12</i>	<i>Tabel Signifikansi Heteroskedastisitas</i>	<i>.....51</i>
<i>Tabel 4-13</i>	<i>Hasil Uji Normalitas</i>	<i>.....51</i>

<i>Tabel 4-14, Koefisien Regresi dan Signifikansi.....</i>	<i>52</i>
<i>Tabel 4-15, Uji Signifikansi Parameter Individual.....</i>	<i>53</i>
<i>Tabel 4-16, Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....</i>	<i>55</i>

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1-1 Kerangka Pemikiran Teoritis	31
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A, Data Mentah Hasil Penyebaran Kuesioner esponden Wajib Pajak PBB

Lampiran B, Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Lampiran C, Hasil Uji Asumsi Klasik dan Uji Hipotesis

Lampiran D, Daftar Tabel

Lampiran E, Kuesioner dan Identitas Responden

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam struktur penerimaan negara, penerimaan perpajakan memiliki peranan yang strategis dan merupakan komponen terbesar serta sumber utama penerimaan dalam negeri untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Selama krisis ekonomi berkepanjangan yang mulai melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997 hingga saat ini, bahwa penerimaan dari sektor pajak memiliki peranan dan sumbangan yang sangat berarti melalui penyediaan sumber dana bagi pembiayaan berbagai program penanggulangan dampak krisis ekonomi.

Selama krisis ekonomi, peningkatan penerimaan dalam negeri melalui mobilisasi penerimaan perpajakan dihadapkan pada tantangan bagi upaya penyehatan APBN dan kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*) melalui penurunan defisit anggaran secara bertahap. Di pihak lain, dalam upaya menanggulangi dampak krisis ekonomi yang berlarut-larut, APBN justru sangat diharapkan berperan dalam menciptakan stimulus fiskal (*fiscal stimulus*) bagi bergeraknya roda kegiatan ekonomi masyarakat, mengingat sektor masyarakat dan peran swasta yang terpuruk akibat krisis belum dapat diharapkan terlalu banyak untuk dapat berperan menggerakkan perekonomian nasional. Namun demikian, sebagai akibat terjadinya krisis ekonomi, berbagai upaya tersebut dihadapkan pada kendala bahwa penerimaan dari dalam negeri menjadi lebih terbatas seiring dengan meningkatnya *potential loss* penerimaan pajak akibat banyaknya perusahaan yang mengalami kerugian, mengurangi kegiatan, dan atau menghentikan operasi. Oleh sebab itu, berbagai kebijakan pokok pemerintah di bidang penerimaan negara yang telah dan sedang dilakukan diarahkan pada upaya untuk

meningkatkan penerimaan perpajakan melalui langkah-langkah yang antara lain meliputi ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan, perbaikan struktur pajak, penyempurnaan sistem administrasi perpajakan dan administrasi pemungutan pajak, serta pencabutan berbagai fasilitas perpajakan (*tax exemption*) yang tidak banyak memberikan manfaat.

Negara Indonesia yang kehidupan rakyat dan perekonomiannya sebagian besar bercorak agraris, bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya mempunyai fungsi penting dalam Pembangunan Nasional. Di sisi lain bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan. Oleh sebab itu rakyat yang memperoleh manfaat atas bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan telah memperoleh hak atas kekuasaan negara layak untuk menyerahkan sebagian dari kenikmatan yang diperolehnya terhadap negara melalui pembayaran pajak.

Pemerintah mempunyai tugas reguler dan pembangunan. Tugas *reguler* adalah memajukan kesejahteraan rakyat, sedangkan tugas pembangunan adalah inovator dan stabilisator pembangunan. Dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut pemerintah memerlukan dana yang salah satu sumbernya berasal dari pajak. Fungsi utama pajak adalah sebagai sumber keuangan negara (*budgetair*). Pajak mempunyai fungsi yang lebih luas dari sekedar sebagai sumber keuangan negara, yaitu fungsi mengatur (*regulerend*) dalam arti bahwa pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (*S.Munawir 2000, hal 6*).

Fungsi utama pajak adalah sebagai sumber keuangan negara (*budgetair*). Selain itu, pajak mempunyai fungsi yang lebih luas dari sekedar sebagai sumber keuangan negara, yaitu fungsi mengatur (*regulerend*), dalam arti bahwa pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (S. Munawir, 2000 hal. 6)

Sistem perpajakan yang berlaku sebelum adanya pembaharuan di bidang pajak (*tax reform*) akhir tahun 1983 khususnya pajak kebendaan dan kekayaan telah menimbulkan tumpang tindih antara pajak yang satu dengan pajak yang lain, sehingga mengakibatkan beban pajak berganda pada masyarakat dan akibatnya mengurangi minat atau kesadaran terhadap pembayaran pajak. Sistem pemungutan pajak tersebut mengandung kelemahan, oleh sebab itu dipandang perlu untuk melakukan pembaharuan sistem perpajakan yang berlaku dengan sistem yang lebih sederhana dan dapat memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya serta memenuhi haknya di bidang perpajakan. Disamping itu, sistem pemungutan yang sederhana akan dapat mewujudkan perluasan dan peningkatan kesadaran kewajiban serta meratakan pendapatan masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah pada tahun 1983 mengadakan pembaharuan perpajakan (*tax reform*) dan menyempurnakan kembali pada tahun 1994 dan tahun 2000.

Tujuan melakukan *tax reform* adalah menghapus sistem perpajakan lama yang terlalu kompleks serta memberikan fasilitas *budgeter-regulerend-social tax*. *Tax reform* dapat menghasilkan sistem perpajakan yang lebih sederhana, mudah, adil dan memberikan kepastian hukum (*rechssicherheit*). Pengaruh atas *tax reform* yaitu sistem perpajakan sekarang ini mudah dipelajari, dipahami dan dipatuhi. *Tax reform* bertujuan

untuk mendorong keberhasilan perpajakan, seperti halnya ditunjukkan dalam tabel 1-1 berikut:

TABEL 1-1
TREND PENERIMAAN PAJAK
PEREODE 1995/1996 S/D 2000/2001

NO	TAHUN ANGGARAN	PENERIMAAN PAJAK (MILYARD)
1	1995/1996	Rp 41.876,90
2	1996/1997	Rp 50.502,00
3	1997/1998	Rp 56.587,00
4	1998/1999	Rp 72.930,80
5	1999/2000	Rp 94.039,70
6	2000/2001	Rp 99.108,60

Sumber: BPS Propinsi Jawa Tengah (diolah dari APBN)

Tabel 1-1, menunjukkan bahwa selama periode tahun 1995/1996 sampai dengan tahun 1999/2001, akibat dari penerapan *tax reform* tersebut penerimaan pajak mengalami kenaikan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak tidak langsung yang dipungut oleh Pemerintah Pusat. Hasil penerimaan PBB diarahkan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan dengan letak obyek pajak, sehingga sebagian besar hasil penerimaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Sumber penerimaan negara dari sektor pajak, salah satunya adalah dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan, meskipun penerimaan nilai rupiahnya relatif kecil bila dibandingkan dengan jenis pajak lain, tetapi mempunyai dampak yang lebih luas sebab hasil penerimaan PBB dikembalikan untuk pembangunan daerah setempat. Oleh sebab itu PBB mempunyai serangkaian karakteristik yang

berbeda dengan jenis pajak lain yang meliputi : (1) nilai rupiahnya relatif kecil dibandingkan dengan pajak lain, (2) memiliki dampak yang lebih luas, karena hasil penerimaan PBB dikembalikan untuk pembangunan daerah yang bersangkutan, (3) merupakan sumber penerimaan pembangunan utama pemerintah daerah, (4) jumlah wajib pajak (WP) relatif lebih besar dibandingkan dengan jenis pajak lainnya, (5) penerimaan PBB cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dan (6) PBB merupakan satu-satunya pajak properti di Indonesia. Berikut ditunjukkan perbedaan penerimaan PBB dengan pajak lainnya dalam tabel 1-2 berikut :

TABEL 1-2

PENERIMAAN PBB DENGAN PAJAK LAINNYA DALAM RAPBN
TAHUN ANGGARAN 1990/ 1991 S/D 1999/2000
(dalam miliar rupiah)

Tahun	Penerimaan minyak bumi dan gas alam	%	Penerimaan perpajakan	%	Penerimaan bukan pajak	%	Penerimaan dalam negeri
1990/1991	17.740,0	42,0	22.010,9	52,2	2.442,1	5,8	42.193,0
1991/1992	15.069,6	35,4	24.919,3	58,5	2.593,1	6,1	42.582,0
1992/1993	15.330,8	31,4	30.091,5	61,6	3.440,3	7,0	48.862,6
1993/1994	12.503,4	22,3	36.665,1	65,3	6.944,6	12,4	56.113,1
1994/1995	13.537,4	20,4	44.442,1	66,9	8.438,5	12,7	66.418,0
1995/1996	16.054,7	22,0	48.686,3	66,7	8.272,9	11,3	73.013,9
1996/1997	20.137,1	23,0	57.339,9	65,4	10.153,3	11,6	87.630,3
1997/1998	30.559,0	27,2	70.934,2	63,2	10.782,3	9,6	112.275,5
1998/1999	41.368,3	26,4	102.394,4	65,5	12.645,7	8,1	156.408,4
1999/2000	58.481,6	31,0	112.815,2	59,9	17.131,6	9,1	188.428,4

Sumber: Nota Keuangan dan RAPBN 1998/1999 s/d 2001, diolah

Dalam satu dasawarsa terakhir, peranan penerimaan perpajakan sebagaimana tabel 1-2 menunjukkan perkembangan yang meningkat dari Rp 22.010,9 miliar pada tahun 1990/1991 menjadi Rp 112.815,2 miliar pada tahun 1999/2000 atau mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 20,3% setiap tahunnya. Penerimaan perpajakan secara dominan memberikan kontribusi terhadap penerimaan dalam negeri, namun secara

persentase peranan penerimaan perpajakan terhadap penerimaan dalam negeri tidak selalu mengalami peningkatan.

Semakin menurunnya peranan penerimaan minyak bumi dan gas alam dan semakin dominannya penerimaan perpajakan atas penerimaan dalam negeri menggambarkan arah kebijakan keuangan pemerintah yang terus menggali sumber-sumber penerimaan dalam negeri dari sektor non mogas, khususnya dari sektor perpajakan. Penerimaan perpajakan pada dasarnya terdiri dari penerimaan pajak dalam negeri dan penerimaan pajak atas perdagangan internasional.

Pemerintah Daerah sudah semestinya berupaya untuk meningkatkan potensi yang ada di daerah berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini sesuai dengan UU no 25 tahun 1999 pasal 6 ayat 2, tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dengan Daerah bahwa penerimaan negara dari PBB dibagi dengan imbalan 10% untuk Pemerintah Pusat dan 90% untuk Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/kota. Sedangkan penerimaan untuk Pemerintah Daerah setelah dikurangi dengan biaya penagihan yaitu 10% dari penerimaan Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/kota, kemudian dibagi untuk Pemerintah Daerah Propinsi sebesar 20% dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 80%. Hasil penerimaan PBB bagi Pemerintah Daerah merupakan PAD yang harus dicantumkan dalam APBD dan digunakan dalam pembiayaan Pembangunan Nasional.

Keberhasilan penerimaan pajak meliputi *collection rate*, *coverage ratio* dan *tax ratio*. *Collection rate* atau keberhasilan penerimaan pajak merupakan rasio tingkat kepatuhan pembayaran wajib pajak dibandingkan dengan pokok ketetapannya pada tahun yang bersangkutan. *Coverage ratio* adalah besarnya wajib pajak riil dibandingkan

dengan wajib pajak potensial, sedangkan *tax ratio* merupakan perbandingan antara penerimaan pajak total dengan *Gross National Product* (GNP).

Menurut Guritno dkk (1987) dalam A. Tony Prasetiantono (1994), bahwa terdapat tiga faktor penentu keberhasilan perpajakan yaitu (1) sistem administrasi dan hukum, (2) kualitas aparat perpajakan serta (3) kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Oleh sebab itu faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan perpajakan khususnya PBB adalah *tax law, tax policy, tax administration and tax payer*. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Chairul Amachi (1992), bahwa faktor-faktor keberhasilan perpajakan adalah faktor administrasi negara dan pajak, faktor undang-undang dan peraturan pelaksanaan perpajakan serta faktor masyarakat yaitu wajib pajak dan kondisi lingkungan. Atas dasar berbagai pendapat tersebut diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian hanya pada faktor masyarakat yaitu wajib pajak sebagai *faktor tax payer*.

Tax payer factors merupakan faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak bagi Dirjen pajak dan merupakan faktor yang bersifat *uncontrollable*, sedangkan *faktor tax law, tax policy dan tax administration* bersifat *controllable*. Alasan inilah yang menjadi dasar penelitian yang hanya memfokuskan pada *tax payer factors*. Hal ini penting dilakukan karena faktor yang melekat pada wajib pajak dan diduga berpengaruh kuat terhadap kepatuhan pembayaran pajak yang sulit untuk dipengaruhi dan dikendalikan.

Faktor *tax payer* yang akan diteliti dalam penelitian ini tentang sikap wajib pajak yang meliputi (1) kepatuhan wajib pajak, (2) sikap wajib pajak terhadap prioritas pembangunan daerah, (3) sikap wajib pajak terhadap sanksi denda PBB, (5) sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus, (6) sikap wajib pajak terhadap kesadaran bernegara, dan (7) sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan. Faktor-faktor selain *tax payer*

tentunya mudah untuk dikendalikan oleh petugas pajak, berbeda dengan faktor *tax payer* yang merupakan faktor yang bersifat *uncontrollable*, maka diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan penting bagi Dirjen Pajak dan Direktorat PBB serta Pemerintah Daerah setempat khususnya dalam upaya meningkatkan keberhasilan penerimaan pajak di era penerapan dan pelaksanaan otonomi daerah saat ini. Oleh sebab itu peneliti terdorong untuk melakukan penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Bambang Suhardito (1996) ingin memperoleh bukti empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerimaan PBB di Kota Surabaya. Variabel penelitiannya sebanyak tiga belas variabel bebas dan satu variabel terikat. Sedangkan Fratnesi (2001) melakukan penelitian ulang dengan pengurangan variabel atas penelitian yang dilakukan oleh Bambang Suhardito (1996) dengan menguji ulang (*reflikasi*) pengaruh faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan PBB di wilayah Kota Bengkulu. Variabel yang digunakan meliputi sebelas variabel bebas dan satu variabel terikat.

Menurut hasil peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Guritno Mangkoesuebrotu dalam A. Tony Prasetiantono (1994), Bambang Suhardito (1996), dan Fratnesi (2001) memperoleh hasil bahwa penerimaan PBB masih relatif kecil dibandingkan dengan jenis pajak lainnya meskipun demikian ada hubungan fungsional antara pendapatan, nilai tanah dan nilai rumah dengan *collection rate*. Hasil penelitian tersebut lebih mengarah terhadap penelitian yang berskala makro yaitu mengukur tingkat keberhasilan penerimaan PBB yang ditunjukkan dengan angka *collection rate*.

Penelitian yang melihat secara mikro telah dilakukan oleh Sulud Kahono (2003) dengan jumlah variabel penelitian sebanyak empat variabel bebas dan satu variabel

tidak bebas. Keempat variabel bebas tersebut meliputi sikap WP terhadap prioritas pembangunan daerah, sikap WP terhadap sanksi denda PBB, sikap WP terhadap pelayanan fiskus dan sikap WP terhadap penghindaran PBB telah umum, sedangkan variabel tidak bebasnya adalah kepatuhan WP dalam membayar pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat variabel bebas baik secara individual maupun secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat, sedangkan kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikatnya hanya sebesar 31,9% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar penelitian tersebut.

Penulis ingin melakukan replikasi atas penelitian tersebut dengan memasukkan dua variabel bebas yaitu sikap wajib pajak terhadap kesadaran bernegara dan sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan, serta mereduksi satu variabel penghindaran PBB telah umum terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB. Peneliti melihat bahwa kedua variabel bebas tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan melakukan pembayaran terhadap pajak karena dengan sadar akan bernegara dan sadar akan kewajiban membayar pajak, maka wajib pajak akan patuh dalam menyelesaikan kewajiban membayar pajak yang menjadi kewajiban wajib pajak.

Demikian juga menurut hasil penelitian Fuad Bawazier (1993) menyatakan bahwa persentase kenaikan PBB sektor perkotaan terbesar bila dibandingkan PBB sektor lain, tetapi tingkat kepatuhan wajib pajaknya rendah, lebih tinggi tingkat kepatuhan sektor pedesaan. Hal senada dikemukakan oleh Guritno Mangkoesoebroto dalam A.Tony Prasetiantono (1994) yang juga menyatakan bahwa potensi PBB sektor perkotaan per m² jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sektor pedesaan. Peneliti ingin mengungkap kembali secara empiris tentang hal tersebut dengan wilayah atau obyek penelitian dengan lingkup yang lebih kecil yaitu di Kota Surakarta.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: apakah sikap wajib pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran PBB di kotamadya Surakarta.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sikap wajib pajak tentang:

- 1) Prioritas pembangunan daerah terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran PBB.
- 2) Sanksi denda PBB terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran PBB.
- 3) Pelayanan fiskus terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran PBB.
- 4) Kesadaran bernegara terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran PBB.
- 5) Kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran PBB.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Memberikan sumbangan Dirjen Pajak dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pembayaran pajak.
- 2) Memberikan sumbangan dalam pengembangan teori perpajakan dan teori akuntansi keperilakuan.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Teori

2.1. Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut di atas. Pada dasarnya teori atribusi menyatakan, bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 1996). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi.

Penentuan internal atau eksternal menurut Robbins (1996) tergantung pada tiga faktor yaitu : (1) kekhususan (ketersendirian atau *distinctiveness*), (2) konsensus, (3) konsistensi. Kekhususan artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seorang dianggap suatu hal yang luar biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika hal itu dianggap hal yang biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi internal. Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal.

Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal. Faktor terakhir adalah konsistensi, yaitu jika seorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon yang sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

Teori atribusi mengelompokkan dua hal yang dapat memutarbalikkan arti dari atribusi. *Pertama*, kekeliruan atribusi mendasar yaitu kecenderungan untuk meremehkan pengaruh faktor-faktor eksternal daripada internalnya. *Kedua*, prasangka layanan diri yaitu seorang cenderung untuk menghubungkan kesuksesannya karena akibat faktor-faktor internal, sedangkan kegagalan dihubungkan dengan faktor-faktor eksternal.

2.2 Teori Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*)

Teori pembelajaran sosial mengatakan bahwa seorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman langsung (*A Bandura, 1977 dalam Robbins, 1996*). Teori ini merupakan perluasan dari teori pengkondisian operan B.F. Skinner (1971) yaitu teori yang mengandaikan perilaku sebagai suatu fungsi dari konsekuensi-konsekuensinya.

Menurut A Bandura (1997), proses dalam pembelajaran sosial meliputi : (1) proses perhatian (*attentional*), (2) proses penahanan (*retention*), (3) proses reproduksi motor, dan (4) proses penguatan (*reinforcement*). Proses perhatian yaitu orang hanya akan belajar dari seseorang atau model, jika mereka telah mengenal dan menaruh perhatian pada orang atau model tersebut. Proses penahanan adalah proses mengingat tindakan suatu model setelah model tidak lagi mudah tersedia. Proses reproduksi motor adalah proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan. Sedangkan proses penguatan

adalah proses yang mana individu-individu disediakan rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku sesuai dengan model.

Teori pembelajaran sosial ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak termasuk PBB. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya.

2.3. Penelitian Akuntansi Keperilakuan Dalam Bidang Perpajakan

Kepatuhan WP dalam membayar pajak dipengaruhi oleh aspek lingkungan (*environmental variables*), aspek psikologis (*psychological variables*), aspek fisik (*physiological variables*), dan latar belakang individu (*background variables*). Penelitian akuntansi keperilakuan dalam bidang perpajakan umumnya terpusat pada kepatuhan pajak yang mencerminkan perilaku secara individu (Bamber, 1993).

2.4. Praktik Pajak Bumi dan Bangunan

Dirjen Pajak Bumi dan Bangunan sejak tahun 1983 dalam menangani informasi tentang obyek pajak sudah menggunakan sistem manajemen informasi yang disebut SISMIOP (*Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak*). SISMIOP ini sebagai pengganti sistem lama dengan tujuan untuk mendata obyek pajak PBB. Perbedaan utama SISMIOP dengan sistem lama adalah penggunaan alat bantu komputer untuk SISMIOP.

SISMIOP mengelompokkan obyek pajak dalam satu lokasi blok atau zone. Tanah di blok atau zone yang sama akan berklasifikasi sama, artinya tidak ada

perbedaan tarif PBB untuk tanah atau bumi per m² antara satu wajib pajak dengan wajib pajak lainnya di blok atau zone yang sama. Sedangkan tarif PBB untuk bangunan dalam satu blok atau zone akan berbeda tergantung jenis dan mutu bangunan masing-masing.

Semua obyek pajak PBB yaitu tanah, baik yang bersubyek pajak atau tidak (*absentee*) akan didaftar dalam SISMIOP. Oleh sebab itu, SISMIOP dapat mengeliminir setiap upaya penyelundupan pajak oleh wajib pajak (*tax-evasion*), sebab wajib pajak tidak dapat menyembunyikan obyek pajak PBB dari pendaftaran fiskus.

Penetapan subyek pajak, obyek pajak, saat terhutangnya pajak, perhitungan penetapan pajak, saat dan cara pelunasan pajak merupakan hal-hal penting dalam praktik perpajakan tidak terkecuali pada praktik pajak Bumi dan Bangunan. Badan Pengawas Keuangan (BPK, 1991) selaku otoritas pengawasan tertinggi di Indonesia, menyebutkan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut yang banyak membuka peluang terjadinya kemungkinan penyimpangan atau ketidaktertiban utamanya pada kegiatan pendataan dan penilaian, penetapan, pemungutan dan penyetoran, disamping fungsi pelayanan PBB, seperti pemberian pengurangan pajak terhutang.

Menurut UU No. 12 tahun 1994 tentang PBB, obyek pajak Bumi dan Bangunan adalah Bumi dan atau Bangunan. Bumi berarti tempat untuk meletakkan bangunan, meliputi tidak hanya tanah darat, tetapi juga perairan. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan. Dengan demikian obyek pajak Bumi dan Bangunan dapat berupa bumi saja, bangunan saja atau kedua-duanya.

Obyek pajak yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah (1) obyek pajak yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum

di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, (2) obyek pajak yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu, (3) obyek pajak yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak, (4) obyek pajak yang digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan atas perlakuan timbal balik, (5) obyek pajak yang digunakan oleh bangsa, badan-badan atau perwakilan internasional dari PBB, The Ford Foundation, Rockefeller Foundation dan lain sebagainya yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Subyek pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bangunan yang meliputi antara lain pemilik, penghuni, pengontrak, penggarap, pemakai dan penyewa. Jika suatu obyek pajak belum diketahui secara pasti siapa wajib pajaknya, maka yang menjadi subyek pajak dapat ditunjuk oleh Dirjen pajak.

Ketentuan khusus yang menjadi subyek pajak PBB adalah :

1. Jika suatu subyek pajak memanfaatkan atau menggunakan bumi dan atau bangunan milik orang lain bukan karena suatu hak berdasarkan UU atau bukan karena perjanjian, maka subyek pajak yang dimanfaatkan atau menggunakan bumi dan atau bangunan ditetapkan sebagai wajib pajak.
2. Suatu obyek pajak yang masih dalam sengketa pemilikan di pengadilan, maka orang atau badan yang memanfaatkan atau menggunakan obyek pajak tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak.
3. Subyek pajak dalam waktu yang lama berada di luar wilayah letak obyek pajak, sedang untuk merawat obyek pajak tersebut dikuasakan kepada orang atau badan yang diberi kuasa dapat ditunjuk sebagai wajib pajak.

Dasar perhitungan penetapan PBB adalah pada tanggal 1 Januari tahun yang bersangkutan yang merupakan batas akhir (*cut-off*) saat terhutangnya pajak PBB, artinya bahwa kondisi tanah dan bangunan pada tanggal tersebut menjadi dasar perhitungan penetapan PBB pada tahun fiskal yang sama. Waktu pembayaran pokok PBB adalah selambat-lambatnya enam bulan setelah SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) terbit dan biasanya sekitar akhir bulan Nopember tahun yang bersangkutan. Bila pembayaran terlambat, maka ditambah denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari pokok PBB. Maksimal denda PBB adalah 24 (dua puluh empat) bulan atau 2 (dua) tahun. Pembayaran pokok ditambah denda PBB bila ada harus dibayar lunas sekaligus, tetapi tidak boleh diangsur.

Penetapan pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP), diisi sendiri oleh Wajib Pajak PBB. Kepada para wajib pajak PBB yang obyek pajaknya berubah atau ditengarahi berubah, diberi formulir SPOP oleh fiskus. Tetapi tidak semua WP PBB yang obyek pajaknya berubah diberi formulir SPOP oleh karena luasnya area yang harus dikelola oleh fiskus dan keterbatasan jumlah aparat fiskus.

Atas inisiatifnya sendiri Wajib pajak PBB juga diperbolehkan untuk mengambil SPOP, mengisi dan kemudian menyerahkannya ke petugas pelayanan pajak. Kebiasaan praktik yang ada penetapan SPPT berdasarkan SPOP setahun sebelumnya.

Penentuan luas tanah, luas bangunan dan jenis bangunan adalah hak wajib pajak PBB, meskipun demikian fiskus dapat merevisi berdasarkan bukti-

bukti dapat dipercaya yang diperoleh fiskus dari sumber lain. Sedangkan hak fiskus adalah menetapkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).

Penetapan NJOP berdasarkan informasi yang didapat dari Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT), aparat Pemerintah Daerah setempat dan dari kegiatan fiskus untuk mencari data tersebut ke lapangan NJOP ditetapkan dari rata-rata harga tanah dan bangunan di suatu blok atau zone daerah tertentu. Fiskus dapat melakukan revisi NJOP setiap dua tahun sekali. Wajib Pajak PBB dapat melunasi beban pajaknya ke bank persepsi yang telah ditunjuk, ke aparat Fiskus melalui aparat Kalurahan atau pemerintah daerah atau langsung ke Kantor Pelayanan PBB setempat.

2.5. Hukum dan Peraturan Perpajakan

Menurut Friedman (1984), suatu sistem hukum berunsur *structure*, *substance* dan *legal culture*. **Structure** adalah aparatur yang menghasilkan peraturan perundang-undangan dan keputusan-keputusan tersebut, yaitu badan legislatif, eksekutif dan yudikatif. **Substance** adalah apa yang dihasilkan oleh suatu sistem hukum dalam bentuk UUD, UU dan peraturan serta keputusan-keputusan pengadilan. Sedangkan **legal culture** adalah pandangan orang-orang atau masyarakat terhadap hukum tersebut dan bagaimana fungsi hukum itu dalam kehidupan sehari-hari.

Bila sistem hukum diumpamakan sebagai suatu perusahaan, maka Friedman menyebutkan *structure* adalah mesin yang menghasilkan, *substance* sebagai produk yang dihasilkan, sedangkan *legal culture* adalah orang-orang yang mengoperasikan mesin dan yang mengetahui kapan mesin perlu dihidupkan atau dimatikan. *Legal culture* ini memegang peranan penting untuk dapat mengarahkan berkembangnya sistem

hukum, karena berkenaan dengan hal bagaimana persepsi, nilai-nilai, idea dan pengharapan masyarakat terhadap hukum. Suatu *substance* hukum, termasuk hukum pajak, berdaya guna (*utilitas*) karena memiliki karakteristik sebagai berikut (1) adanya kepastian hukum (*rechssicherheit*), (2) kemanfaatan (*zweekassigheit*), dan (3) keadilan (*gerechtigheit*).

Hukum pajak material adalah jiwa suatu hukum atau perundang-undangan yang mengikat para pelaku hukum, baik disebutkan secara eksplisit maupun tidak. Contoh hukum pajak material disebutkan dalam UUD '45 Pasal 23 ayat 2 yang berbunyi : "*segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan UU.*"

Hukum pajak formil adalah hukum atau peraturan formil yang menjelaskan siapa (subyek), apa (obyek), berapa besar, bagaimana dan kapan suatu pelaksanaan penetapan , pengenaan dan penagihan pajak. UU, peraturan serta keputusan pejabat negara yang diuraikan dibawah ini merupakan contoh mengenai hukum pajak formil, khususnya yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan.

Dasar hukum yang mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan adalah UU No.12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 tahun 1994 tentang perubahan atas UU No.12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam pelaksanaannya, PBB juga diatur dengan Peraturan Pemerintah serta Keputusan Menteri Keuangan seperti Peraturan Pemerintah No.46 tahun 1985 tentang Persentase Nilai Jual Kena pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan, Keputusan Menteri Keuangan No. 201/KMK.04.2000 tentang penyesuaian Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak Tidak kena Pajak (NJOPTKP) sebagai dasar Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.

2.6. Karakteristik Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak kebendaan (*objective/ zakelijk*), artinya penetapan pajak tidak dilihat dari kemampuan ekonomis subyek pajak, tetapi ditetapkan berdasarkan luas, klasifikasi dan lokasi obyek pajak. Dengan kata lain pengenaan PBB tidak berdasarkan aktifitas dan bentuk perusahaan, tetapi berdasarkan luas, klasifikasi dan lokasi obyek pajak.

Beban pengenaan PBB dapat diperlakukan sebagai biaya operasi perusahaan untuk wajib badan dan dapat mengurangi penghasilan bruto wajib pajak, bila mereka membuat pembukuan untuk mencatat aktivitas usahanya. Atau dengan kata lain wajib pajak PBB pribadi perusahaan dan badan perusahaan dapat melimpahkan beban PBB nya kepada konsumen terhadap produk yang dijual.

Dampak *tax-reform* 1983 dan *tax reform* revisi 1994 adalah membuat PBB berazas mudah, sederhana, adil, mudah dimengerti, mudah dilaksanakan, mudah dihayati, menghilangkan pengenaan pajak berganda dan berkepastian hukum. Sedangkan sifat khusus PBB adalah (1) digunakan untuk public investment secara langsung, (2) pajak tidak langsung, (3) bertarif proporsional (0,5%).

Selain sifat khusus tersebut , PBB juga memiliki karakteristik secara khusus yang meliputi :

1. Jumlah wajib pajak PBB besar, terbanyak dibandingkan wajib pajak lain.
2. Aktivitas penagihan melalui aparat pemerintah Daerah. Departemen Keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak, termasuk Direktorat PBB ikut menikmati atau memanfaatkan kesejahteraan Pemerintah Daerah.
3. Dari segi tujuan pengenaannya, menurut Guritno (1992) PBB bertujuan untuk menjadi sumber penerimaan pemerintah, selain PPN dan PPh.

4. PBB dipakai sebagai agunan pinjaman (pembangunan) daerah. Perlakuan terhadap dana hasil pungutan PBB sebagai dana rutin (tiap tahun tercantum dalam APBN/APBD) dan bersifat pembangunan umum (*seperti unsur penerimaan general fund*), bukan pengelolaan terpadu seperti capital project fund dan bukan sebagai cadangan pelunasan hutang seperti debt service fund (Douglas, 1991; Henke, 1989; Freeman et.al., 1988; Herbert et.al., 1987; Schroeder et.al., 1987 dan Hay, 1985), dalam Bambang Suhardito (1996, h.29).

2.7. Kepatuhan Wajib pajak

Kepatuhan berarti patuh dan taat pada peraturan yang berlaku. Dalam hal pajak, aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Sedangkan wajib pajak adalah orang atau badan yang karena peraturan perpajakan wajib melaporkan dan membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah tingkat ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut E. Ellyani (1989) yang dikutip oleh Kiryanto (1998) dinyatakan bahwa :

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang dan membayar pajak pada waktunya, tanpa ada tindakan pemaksaan. Ketidakpatuhan timbul bila salah satu syarat definisi tersebut tidak dipenuhi.

Dalam hal kepatuhan wajib pajak PBB dapat diukur dengan melihat peraturan PBB yang berlaku yaitu UU no.12 tahun 1994. Kepatuhan WP PBB dapat dihubungkan misalnya dengan melihat perilaku WP dalam membayar PBB tepat pada waktunya, melaporkan setiap bentuk perubahan dari tanah atau rumah yang ditempati sendiri ataupun tanah/rumah yang ditempati tetangga, mengurus dan mengisi SPOP dengan

benar serta menyerahkan SPOP yang sudah diisi ke Kantor Pelayanan PBB atau aparat yang ditunjuk.

2.8 Sikap Wajib pajak

Sikap sebagai "*pre dispois*" tingkah laku manusia menurut Mar'at (1981) dalam La Midjan (1994), sangat dipengaruhi oleh rangsangan atau stimulus tertentu. Dapat dikatakan bahwa rangsangan diperoleh dari luar pribadi individu, kemudian akan membentuk persepsi antara lain sebagai hasil hubungan di dalam suatu lingkungan sosial. Lebih lanjut dikatakan bahwa sikap harus ditafsirkan terlebih dahulu sebagai tingkah laku yang bersifat tertutup. Dalam pengertian bahwa sikap adalah kesiapan, kesediaan untuk bertindak dan bukan sebagai pelaksana motif tertentu.

Mar'at (1981) pada sisi lain mengemukakan bahwa sebagai titik awal untuk menerima stimulus adalah melalui alat indera seperti penglihatan, pendengaran, alat raba, rasa dan bau. Dalam diri individu sendiri terjadi dinamika berbagai psikofisik seperti kebutuhan, motivasi, perasan, perhatian dan pengambilan keputusan. Semua proses tersebut sifatnya tertutup sebagai dasar pembentukan suatu sikap yang pada akhirnya melalui ambang batas terjadi tindakan yang bersifat terbuka dan inilah yang disebut dengan perilaku.

Menurut Mar'at (1981) bahwa perwujudan perilaku sebagai gerakan tindakan, dilandasi oleh sikap yaitu untuk mencapai sasaran bernilai yang berpangkal pada dorongan (*stimulus*), akhirnya mencapai puncak sasaran yang bernilai (*values*). Nilai ini menunjukkan konsistensi organisasi tingkah laku individu.

Fishbein dan Ajzen (1975) dalam La Midjan (1994), membagi sikap atas tiga komponen, yaitu : (1) *afektif*, berhubungan dengan perasaan di dalam menilai sesuatu

obyek, manusia, isu atau kejadian. Dengan kata lain afektif berhubungan dengan sikap suka atau tidak suka atas sesuatu obyek; (2) *kognitif*, berhubungan dengan pengetahuan, pendapat, kepercayaan dan pikiran tentang sesuatu obyek. Dengan kata lain *kognitif* berhubungan dengan sikap berguna atau tidak berguna sesuatu obyek; dan (3) *konatif*, berhubungan dengan perilaku tindakan. Dengan kata lain, *konatif* berhubungan dengan sikap akan atau tidak akan bertindak atas sesuatu obyek.

Dalam penelitian ini yang dimaksudkan dengan sikap wajib pajak adalah sikap WP terhadap pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan yang meliputi (1) sikap WP terhadap pembangunan daerah, (2) sikap WP terhadap sanksi denda PBB, (3) sikap WP terhadap pelayanan fiskus, (4) sikap wajib pajak terhadap kesadaran bernegara dan (5) sikap Wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan. Sikap wajib pajak tersebut diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban membayar pajak, khususnya pajak Bumi dan Bangunan yang pada akhirnya akan berpengaruh juga pada tingkat keberhasilan penerimaan PBB dalam skala makro. Untuk itu di bawah ini dijabarkan pengertian dari masing-masing faktor tersebut.

2.9 Sikap Wajib Pajak Terhadap Pembangunan Daerah

Dampak atas diberlakukannya UU No.22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka mendorong Pemerintah Daerah untuk termotivasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS). PADS bagi pemerintah daerah sangat penting, karena merupakan sumber utama dalam menunjang pembangunan daerah yang bersangkutan disamping sumber yang berasal dari dana APBN.

PBB merupakan salah satu sumber pemasukan bagi pemerintah daerah. Hasil penerimaan PBB dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur daerah yang bersangkutan. Karena terbatasnya dana, maka pembangunan infrastruktur tersebut dilakukan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas pemerintah daerah yang bersangkutan.

Lukman Sutrisno (1994), mengatakan bahwa layanan pemerintah termasuk pembangunan infrastruktur akan mempengaruhi pembayaran pajak PBB, khususnya wajib pajak PBB perkotaan. Untuk itu sikap WP dalam memandang pembangunan daerahnya diduga akan berpengaruh dalam kepatuhan WP dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak khususnya PBB. Dalam hal ini sangat relevan bila sikap WP terhadap prioritas pembangunan daerah digunakan sebagai variabel bebas dalam penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan Bambang Suhardito (1996), Fratnesi (2001) dan Sulud Kahono (2003) menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap pembangunan daerah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB.

H1: Sikap wajib pajak terhadap pembangunan daerah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB.

2.10 Sikap Wajib Pajak Terhadap Pelaksanaan Sanksi Denda PBB

Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan yang tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar supaya Undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak.

Sanksi PBB dimulai dari yang teringan, yaitu berupa peringatan dan teguran, sampai yang terberat yakni kurungan dan sita. Sanksi PBB yang banyak diterapkan adalah dengan denda, yaitu sebesar 2% (dua persen) dari pokok ketetapan pajak terhutang pada tahun yang bersangkutan. Denda PBB diberlakukan jika wajib pajak tidak melaksanakan pembayaran PBB dalam batas waktu yang telah ditetapkan.

Masyarakat akan mematuhi pembayaran PBB bila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan PBB yang harus dibayar oleh WP, maka akan semakin berat bagi wajib pajak PBB untuk melunasinya. Oleh sebab itu sikap atau pandangan masyarakat terhadap sanksi denda PBB diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan WP dalam pembayaran PBB. Hal ini sangat relevan jika digunakan sebagai variabel bebas dalam penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan Bambang Suhardito (1996), Fratnesi (2001) dan Sulud Kahono (2003) menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap sanksi denda PBB berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB.

H2: Sikap wajib pajak terhadap sanksi denda PBB berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB.

2.11 Sikap Wajib Pajak Terhadap Pelayanan Fiskus

Tingkat keberhasilan penerimaan PBB selain dipengaruhi oleh *Tax payer* juga dipengaruhi oleh *tax policy*, *tax administration* dan *tax law*. Tiga faktor terakhir ini melekat dan dikendalikan oleh fiskus itu sendiri, sedangkan faktor *tax payer* didominasi dari dalam diri wajib pajak itu sendiri. Petugas pajak (fiskus) dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat atau wajib pajak sangat dipengaruhi dengan *adanya tax policy*, *tax administration* dan *tax law*.

Para wajib pajak akan patuh dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak tersebut memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajaknya. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lukman Sutrisno (1994), yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara pembayaran pajak dengan mutu pelayanan publik untuk wajib pajak di sektor perkotaan.

Dengan demikian seorang fiskus diharapkan mempunyai kompetensi dalam arti memiliki keahlian (*skill*), Pengetahuan (*knowledge*), dan pengalaman (*experience*) dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundangan-undangan perpajakan. Selain itu fiskus harus termotivasi dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan publik.

Dari uraian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa sikap masyarakat dalam hal ini adalah wajib pajak dalam memandang mutu pelayanan petugas pajak diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Oleh karena itu sangat relevan apabila sikap WP terhadap pelayanan fiskus digunakan sebagai variabel bebas penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan Bambang Suhardito (1996), Fratnesi (2001) dan Sulud Kahono (2003), menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB.

H3: Sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB.

2.12 Sikap WP terhadap Kesadaran Bernegara dan Kesadaran Perpajakan

Cita-cita kemerdekaan sekaligus tujuan pembentukan NKRI menurut pembukaan UUD'45 adalah melindungi bangsa dan tanah air, memajukan kesejahteraan

rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kesadaran bernegara merupakan sikap masyarakat terhadap fungsi negara. Pengetahuan tentang fungsi negara akan menjadikan masyarakat wajib pajak sadar bahwa pelaksanaan fungsi negara tersebut membutuhkan dana. Sumber dana utama aktivitas pemerintah adalah dari pajak. Pengetahuan tentang fungsi negara dilengkapi dengan pengalaman masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi negara termasuk layanan pemerintah, yang akan membawa masyarakat ke situasi emosional untuk menjustifikasikan pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah.

H4: Sikap wajib pajak terhadap kesadaran bernegara berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB.

Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Membayar pajak merupakan sumbangan wajib pajak bagi terciptanya kesejahteraan bagi diri mereka sendiri serta bangsa secara keseluruhan (Loekman Sutrisno, 1994).

Penelitian yang dilakukan Bambang Suhardito (1996), menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB.

H5: Sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB.

2.13 Sikap wajib pajak terhadap pembangunan daerah, sanksi denda PBB, pelayanan fiskus, kesadaran bernegara dan kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB.

Hasil penelitian terdahulu sebagaimana dijabarkan dalam hipotesis 1(satu) sampai dengan hipotesis 5 (lima) menemukan bahwa sikap wajib pajak terhadap pembangunan daerah, sanksi denda PBB, pelayanan fiskus, kesadaran bernegara dan kesadaran perpajakan secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB. Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H6: Sikap wajib pajak terhadap pembangunan daerah, sanksi denda PBB, pelayanan fiskus, kesadaran bernegara dan kesadaran perpajakan secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang perpajakan setelah *tax reform* masih sedikit dijumpai, termasuk untuk Pajak Bumi dan Bangunan. Peneliti terdahulu yang meneliti tentang PBB antara lain Guritno Mangkoesobroto dalam A. Tony Prasetyantono (1994), kemudian Bambang Suhardito (1996), Fratnesi (2001) dan Sulud Kahono (2003).

Penelitian Guritno (1992) menguji ada tidaknya hubungan fungsional antara pendapatan, nilai tanah dan nilai rumah dengan *collection rate* PBB. Variabel terikatnya *collection rate*, sedangkan variabel bebasnya meliputi: pendapatan, nilai tanah dan nilai rumah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan PBB masih relatif kecil, dan ada hubungan fungsional antara pendapatan, nilai tanah dan nilai rumah dengan *collection rate* PBB.

Sementara itu Bambang Suhardito (1996) memperluas variabel-variabel penelitian Guritno (1992) dengan menambah variabel penelitian, antara lain tentang perilaku, sikap dan persepsi wajib pajak. Variabel penelitiannya sebanyak tiga belas variabel bebas dan satu variabel terikat. Penelitian tersebut mencoba mendapatkan bukti

empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerimaan PBB di Kota Surabaya. Wajib pajak dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu wajib pajak wiraswasta dan wajib pajak nir-wiraswasta. Hasil penelitian menemukan bukti bahwa : faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB adalah kesadaran perpajakan wajib pajak, rasio beban PBB dibandingkan dengan beban wajib pajak, rasio beban hitung *permanent difference* (hanya berpengaruh pada WP PBB wiraswasta), sikap wajib pajak terhadap prioritas pembangunan pemerintah, persepsi WP tentang pelaksanaan sanksi denda PBB (khusus untuk WP PBB nir-wiraswasta), *tax-avoidance* wajib pajak, pendidikan (untuk WP PBB nir-wiraswasta), lama tinggal WP di lokasi obyek pajak (hanya WP PBB nir-wiraswasta). Sedangkan faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak sisanya ditemukan bukti tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB, yaitu : kesadaran bernegara, pemahaman WP terhadap UU, persepsi WP bahwa penghindaran PBB telah umum, pendapat WP terhadap berat tidaknya beban PBB dan status rumah WP.

Fratnesi (2001) melakukan penelitian selanjutnya yang telah dilakukan oleh Bambang Suhardito (1996) guna meneliti ulang pengaruh faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan PBB dengan lokasi di Kota Bengkulu. Dalam penelitian ini tidak membedakan WP PBB antara WP wiraswasta dengan WP nir-wiraswasta. Dalam penelitiannya ada tiga variabel bebas yang dihilangkan dan menambah satu variabel bebas yang sebelumnya belum pernah diteliti. Adapun tiga variabel bebas yang ditambahkan adalah faktor kesadaran bernegara, faktor pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan PBB serta faktor *tax avoidance* wajib pajak. Sedangkan satu variabel bebas yang ditambahkan

adalah pendapat wajib pajak terhadap pelayanan fiskus. Dengan demikian variabel yang diteliti terdiri dari sebelas variabel bebas dan satu variabel terikat.

Hasil penelitian ini menemukan bukti bahwa ada delapan variabel bebas yang berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu, yaitu kesadaran perpajakan, rasio beban PBB dibandingkan dengan pendapatan wajib pajak, sikap wajib pajak terhadap pembangunan daerah, sikap wajib pajak terhadap sanksi denda PBB, pendapat wajib pajak tentang penghindaran PBB telah umum, pendidikan wajib pajak, status tanah atau rumah wajib pajak dan pendapat wajib pajak terhadap pelayanan fiskus. Sedangkan faktor-faktor yang melekat lainnya seperti *rasio beda hitung permanent difference*, pendapat wajib pajak tentang berat tidaknya beban PBB, dan lama tinggal wajib pajak tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.

Sulud Kahono (2003) melakukan penelitian selanjutnya dengan menemukan satu (1) variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak PBB dan empat (4) variabel bebas yaitu : sikap WP terhadap prioritas pembangunan daerah, sikap WP terhadap sanksi denda PBB, sikap WP terhadap pelayanan Fiskus, sikap WP bahwa penghindaran PBB telah umum. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keempat variabel bebas secara individu maupun bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat.

Secara ringkas hasil penelitian terdahulu dapat dilihat dalam tabel 2-1 berikut ini:

TABEL 2-1
RINGKASAN HASIL PENELITIAN TERDAHULU

No	Nama Peneliti	Variabel	Alat Analisis	Hasil penelitian
1	Guritno (1994)	<i>Variabel terikat :</i> Collection rate <i>Variabel bebas :</i> Pendapatan, nilai tanah dan nilai rumah	Chi-Square	Ada hubungan fungsional antara pendapatan, nilai tanah dan nilai rumah dengan collection rate PBB
2.	Bambang Suhardito (1996)	Variabel terikat :Collection rate Variabel bebas : (13 variabel): kesadaran perpajakan, rasio beban PBB dibandingkan pendapatan WP, rasio beda hitung difference , sikap WP terhadap prioritas pembangunan pemerintah, persepsi WP tentang pelaksanaan sanksi denda PBB, tax avoidance, pendidikan, lama tinggal WP, kesadaran bernegara, pemahaman WP terhadap UU, persepsi WP bahwa penghindaran PBB telah umum , pendapat Wp terhadap berat tidaknya beban PBB dan status rumah WP.	Chi-Square dan Regresi berganda	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Meneliti pengaruh faktor faktor yang melekat pada WP terhadap keberhasilan penerimaan PBB di Kota Surabaya.</i> • Membedakan WP PBB menjadi WP Wiraswasta dan WP Nir-wiraswasta. • <i>ada 8 variabel yang berpengaruh</i> terhadap keberhasilan penerimaan PBB yaitu : kesadaran perpajakan ,rasio beban PBB dibandingkan beban WP, rasio beda hitung <i>permanent difference</i> (hanya berpengaruh pada WP PBB wiraswsta), sikap WP terhadap prioritas pembangunan pemerintah, persepsi WP tentang pelaksanaan sanksi denda PBB (khusus untuk WP PBB nir-wiraswasta), tax avoidance, pendidikan (pada WP PBB <i>Nir-wiraswasta</i>), lama tinggal WP di lokasi obyek pajak (hanya WP Nir-wiraswasta), <i>sedangkan 5 variabel bebas</i> sisanya tidak berpengaruh yaitu : kesadaran bernegara, pemahaman WP terhadap UU, persepsi WP bahwa penghindaran PBB telah umum, pendapat WP terhadap berat tidaknya beban PBB dan status rumah WP.
3	Fraterneski (2001)	Variabel terikat : Collection rate, Variabel bebas (11 var): kesadaran perpajakan, rasio beban PBB dibandingkan dengan pendapatan WP, sikap WP terhadap pembangunan daerah, sikap WP terhadap sanksi denda PBB, pendapat WP tentang penghindaran PBB telah umum, pendidikan WP, status tanah/ rumah WP , pendapat WP terhadap pelayanan fiskus , rasio beda hitung permanent difference, pendapat WP tentang berat tidaknya PBB dan lama tinggal WP.	Regresi berganda	<p><i>Meneliti pengaruh faktor-faktor yang melekat pada WP terhadap keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak membedakan WP PBB wiraswasta dan Nir-wiraswasta. • <i>ada 8 variabel bebas yang berpengaruh</i> terhadap keberhasilan penerimaan PBB di kota Bengkulu : kesadaran perpajakan , rasio beban PBB dibandingkan pendapatan WP, sikap WP terhadap pembangunan daerah, sikap WP terhadap sanksi denda PBB, pendapat WP tentang penghindaran PBB telah umum, pendidikan WP, status rumah/tanah WP, pendapat WP terhadap pelayanan fiskus. Tiga (3) variabel bebas sisanya ditemukan tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB yaitu : rasio beda hitung permanent difference, pendapat WP tentang berat tidaknya beban PBB dan lama tinggal WP.
4	Sulud Kahono (2003)	Variabel terikat : kepatuhan WP dalam pembayaran PBB. Variabel bebas (4 var) : sikap WP terhadap prioritas pembangunan daerah, sikap WP terhadap sanksi denda PBB, sikap WP terhadap pelayanan Fiskus, sikap WP bahwa penghindaran PBB telah umum	Regresi berganda	<p><i>*Meneliti pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB studi empiris di wilayah KP.PBB Semarang.</i></p> <p><i>*ada empat (4) variabel bebas yang berpengaruh</i> baik secara individu maupun kelompok / bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat di kota Semarang.</p>

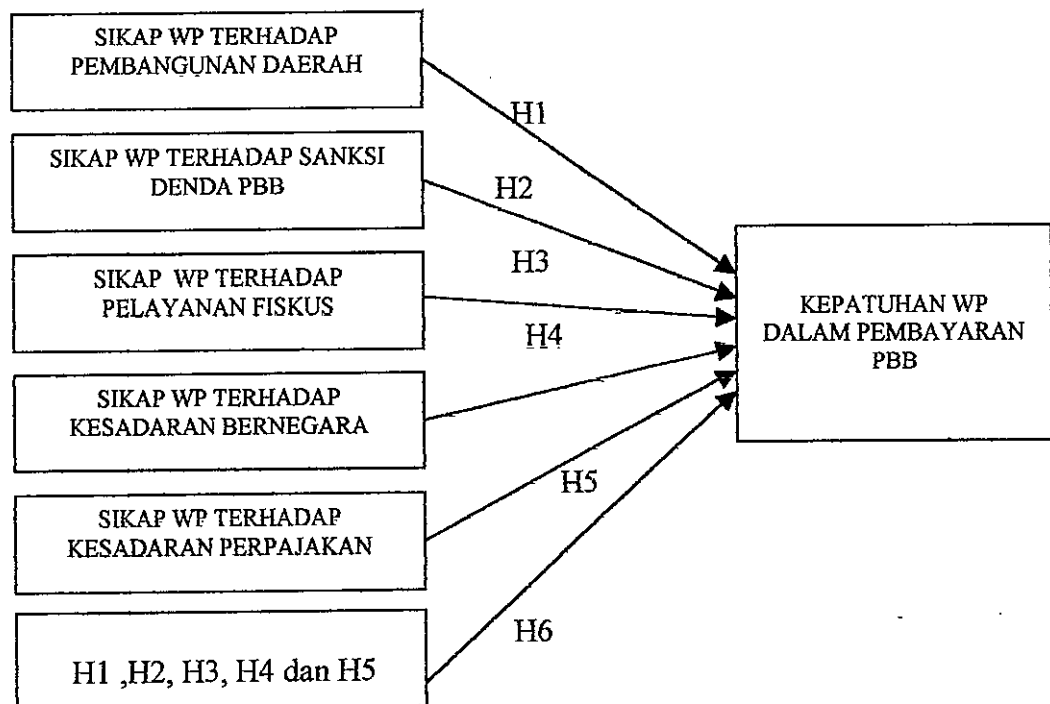
Sumber : Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu yang diolah

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka pemikiran teoritis yang dibuat mengenai pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Gambar 1-1

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini mengambil data baik primer maupun sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari responden yaitu wajib pajak PBB yang terpilih dan berada di wilayah kota Surakarta per Kecamatan secara proporsional. Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi kepatuhan perpajakan, Sikap WP terhadap pembangunan daerah, Sikap WP terhadap sanksi denda PBB, Sikap WP terhadap pelayanan fiskus, Sikap WP terhadap kesadaran bernegara, Sikap WP terhadap kesadaran perpajakan. Sedangkan data sekunder bersumber dari laporan yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Kota Surakarta. Data sekunder yang dimaksud meliputi data tentang jumlah wajib pajak PBB per Kecamatan tahun 2002, jumlah ketetapan PBB per Kecamatan tahun 2002 serta target dan realisasi pembayaran PBB Kota Surakarta pada tahun anggaran 2002. Disamping itu data sekunder diperoleh pula dari Kantor Biro Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah meliputi data trend penerimaan pajak, penerimaan PBB dengan jenis pajak lain.

3.2. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini yang merupakan populasi wajib pajak PBB di Kota Surakarta yang terdaftar dalam buku Penerimaan PBB dan BPHTB tahun 1996-2000 yang diterbitkan oleh Direktorat PBB dan BPHTB tahun 2001, jumlah wajib pajak yang tercatat pada Kantor Pelayanan PBB Kota Surakarta sebanyak 112.850 Wajib pajak.

Penentuan sampel menggunakan metode systematic sampling dan berteknik *a systematic sample with a random start*-nya Babbie, Earl (1983) atau *a one-in-k systematic sample* Scheaffer (1979) dengan menggunakan rumus :

$$n = \frac{Npq}{(N-1) * D * pq}$$

dimana :

$$D = \frac{B^2}{4}$$

n = jumlah sampel yang diinginkan

N = jumlah populasi (112.859)

P = resiko sampling error dipakai 0,5 (sebab proporsi awal tidak diketahui)

q = (1-p) =0,5

B = Bound of error atau kelonggaran kesalahan diperkirakan berinterval range tidak lebih dari 10% atau 0,1

D = (0,1 *0,1 :4 = 0.0025

Berdasarkan jumlah populasi yang telah diketahui dan perhitungan rumus di atas, maka jumlah sampel yang diperlukan sebanyak 400 responden WP. Setelah diketemukan jumlah sampel yang diinginkan, maka selanjutnya ditentukan sampel per Kecamatan dengan metode kuota sampling. Setelah diketahui sampel per kecamatan, maka untuk memasukkan responden terpilih, digunakan metode pengambilan sampel acak sederhana. Dengan diketahui jumlah populasi dan jumlah sampel penelitian, maka pembagian sampel secara proporsional berdasarkan jumlah wajib pajak dapat ditentukan, seperti tabel 3-1 berikut ini :

TABEL 3-1
PENENTUAN SAMPEL PER KECAMATAN
KOTA SURAKARTA

NO	NAMA KECAMATAN	POPULASI (WP.PBB)	PROPORSIONAL	JUMLAH SAMPEL
1	Pasar Kliwon	17.295	$(17.295 : 112.850) \times 400$	62
2	Laweyan	18.558	$(18.558 : 112.850) \times 400$	65
3	Jebres	30.294	$(30.294 : 112.850) \times 400$	107
4	Banjarsari	36.562	$(36.562 : 112.850) \times 400$	130
5	Serengan	10.141	$(10.141 : 112.850) \times 400$	36
Total		112.850		400

Sumber : KP.PBB Kota Surakarta yang diolah

3.3 Prosedur Pengumpulan Data

Target dan realisasi PBB kota Surakarta, jumlah wajib pajak PBB Kota Surakarta yang merupakan Data sekunder diperoleh secara langsung dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Surakarta, sedangkan gambaran umum responden, trend perpajakan dan perbandingan PBB dengan pajak lainnya dalam APBN diperoleh melalui Kantor Biro Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah . Data skunder dikumpulkan , kemudian diolah dalam bentuk diskripsi dan tabel yang dapat memberikan gambaran secara jelas dan rinci tentang penerimaan Negara sektor pajak, perbandingan antara PBB dengan pajak lainnya dalam APBN dan dapat mengetahui target serta realisasi PBB di Kota Surakarta.

Data Primer diperoleh dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Bambang Suhardito (1996), Fratnesi (2001) dan Sulud Kahono (2003) dengan modifikasi sedemikian rupa agar sesuai dan relevan dengan masalah yang akan diteliti.

Model pengumpulan data primer dengan cara kunjungan ke rumah (visit) terhadap wajib pajak PBB. Metode ini ditempuh dengan harapan agar tingkat pengembalian kuesioner dapat dipastikan dan juga peneliti dapat menjelaskan kepada responden bila ditemui persoalan kekurangan jelasan dalam pengisian kuesioner, namun demikian tidak akan mempengaruhi dalam pemilihan item terhadap responden. Dengan model kunjungan ke rumah ini, maka uji non respon bias tidak lagi diperlukan, tetapi tetap dilakukan uji reliabilitas dan uji validitas terhadap instrumen yang digunakan sebelum disebarkan kepada responden.

3.4. Definisi Operasional dan Pengukurannya

Definisi operasional variabel dari pengukurannya yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepatuhan WP yaitu sikap WP terhadap kepatuhan peraturan perpajakan khususnya PBB. Sikap tersebut seperti kesediaan WP menerima atau mengambil dan mengisi SPOP dengan tepat dan benar, membayar PBB tepat pada waktunya dan melaporkan segala bentuk perubahan yang terjadi atas tanah dan bangunan yang dijadikan tempat tinggal WP. Kepatuhan WP diukur dengan skala Likert terdiri atas 5 item pertanyaan.
2. Sikap WP terhadap Prioritas Pembangunan Daerah yaitu sikap atau konstelasi komponen yang berinteraksi antara pemahaman, perasaan dan perilaku terhadap makna dan fungsi prioritas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Daerah. Variabel ini diukur dengan skala Likert terdiri atas 6 item pertanyaan.
3. Sikap WP tentang pelaksanaan sanksi denda PBB yaitu sikap responden tentang pelaksanaan sanksi denda PBB terhadap responden sendiri dan orang lain di

sekitar responden. Variabel ini diukur dengan skala Likert terdiri atas 4 item pertanyaan.

4. Sikap WP terhadap pelayanan fiskus yaitu sikap atau konstelasi komponen kognitif, afektif dan konatif yang berinteraksi dalam merasakan bagaimana pelayanan fiskus yang sesungguhnya terjadi. Variabel ini diukur dengan skala Likert atas 5 item pertanyaan.
5. Sikap WP terhadap kesadaran bernegara yaitu sikap responden terhadap fungsi negara yang berelemen kognitif, afektif dan konatif terhadap fungsi negara. Pengetahuan terhadap fungsi negara (*kognitif*) akan membuat responden sadar bahwa pelaksanaan fungsi negara memerlukan dana. Variabel ini diukur dengan skala Likert terdiri atas 5 item pertanyaan.
6. Sikap WP terhadap kesadaran perpajakan yaitu sikap responden terhadap penilaian positif terhadap pemerintah yang berakibat akan dapat menggerakkan atau menyadarkan mematuhi kewajiban untuk membayar pajak yang berelemen kognitif, afektif dan konatif. Variabel ini diukur dengan skala Likert terdiri atas 6 item pertanyaan.

3.5. Identifikasi Variabel

Penelitian ini terdiri atas 5 (lima) variabel bebas dan 1 (satu) variabel terikat, seperti tampak pada tabel identifikasi variabel-variabel penelitian:

TABEL 3-2
IDENTIFIKASI VARIABEL PENELITIAN

NO	NAMA VARIABEL	PROKSI	SKALA	SUMBER DATA
A	Variabel Tidak bebas			
1	Kepatuhan Wajib Pajak	Kognitif, afektif dan konatif	interval	Kuesioner
B	Variabel Bebas			
1	Sikap WP terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Kognitif, afektif dan konatif	interval	Kuesioner
2	Sikap WP terhadap sanksi denda PBB	Kognitif, afektif dan konatif	interval	Kuesioner
3	Sikap WP terhadap pelayanan fiskus	Kognitif, afektif dan konatif	interval	Kuesioner
4	Sikap WP terhadap kesadaran bernegara	Kognitif, afektif dan konatif	interval	Kuesioner
5	Sikap WP terhadap kesadaran perpajakan	Kognitif, afektif dan konatif	interval	Kuesioner

Sumber : hasil kuesioner yang diolah

3.6. Teknik Analisis

3.6.1 Uji Kualitas Data

Uji kualitas data dengan menggunakan regresi berganda (*multiple regression*). Data yang diregresi adalah data primer yang telah didistribusikan dan telah dilakukan uji kualitas data seperti uji reliabilitas, uji validitas dan uji asumsi klasik. Oleh sebab data primer yang diolah berskala interval, maka dapat digunakan dengan regresi (Imam Ghazali, 2001). Program pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan program SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*) versi 10.

3.6.1.1. Uji Reliabilitas

Suatu alat ukur atau instrumen yang berupa kuesioner dikatakan dapat memberikan hasil ukur yang stabil atau konstan, bila alat ukur tersebut dapat diandalkan atau reliabel. Oleh sebab itu perlu dilakukan uji reliabilitas. Suatu kuesioner dikatakan

reliabel atau handal bila jawaban seorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pada umumnya suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel bila memberikan Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60 (Nunnally, 1994).

3.6.1.2. Uji Validitas

Kesahihan (*validity*) suatu alat ukur ialah kemampuan alat ukur itu untuk mengukur apa yang sebenarnya harus diukur atau dengan perkataan lain alat ukur dapat mengukur indikator-indikator suatu obyek pengukuran. Kesahihan itu perlu sebab pemrosesan data yang tidak sah atau bias akan menghasilkan kesimpulan yang tidak benar.

Untuk melihat apakah instrumen tersebut valid, maka dilakukan uji validitas dengan cara mengkorelasikan antara skor masing-masing butir pertanyaan terhadap total skor. Bila korelasi antara masing-masing butir terhadap total skor tersebut signifikan maka data tersebut dinyatakan valid.

3.6.1.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik meliputi uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji normalitas. Uji multikolonieritas dengan maksud untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebasnya. Bila variabel bebas ada korelasi yang cukup tinggi ($R^2 > 0,90$), maka dapat disimpulkan bahwa adanya multikolonieritas.

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk

pengujian ini digunakan plot. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan uji Glejser.

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ yaitu periode sebelumnya. Untuk pengujian ini digunakan uji Durbin Waltson.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi antara variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Hal ini dapat dilihat dengan menggunakan skweness statistik

Karena teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan regresi berganda, maka dapat dituliskan persamaan regresinya sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan WP

β_0 = konstanta

β_1 s/d β_5 = koefisien regresi variabel bebas.

X_1 = sikap WP terhadap prioritas pembangunan daerah

X_2 = Sikap WP terhadap sanksi denda PBB

X_3 = pendapat WP terhadap pelayanan fiskus

X_4 = Sikap Wp terhadap kesadaran bernegara

X_5 = sikap WP terhadap kesadaran perpajakan

3.6.2. Uji Hipotesis

Uji hipotesis (H1, H2, H3, H4 dan H5) digunakan uji signifikansi parameter individual (*uji statistik t*), sedangkan uji hipotesis (H6) digunakan uji signifikansi simultan (*uji statistik F*). Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependennya. Sedangkan melalui uji statistik F dapat ditunjukkan apakah semua variabel penjelas atau independen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel independennya.

Cara untuk melakukan uji t adalah dengan membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Bila $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$, maka hipotesis alternatif diterima. Sedangkan uji statistik F dapat dilakukan dengan membandingkan antara $F\text{-hitung}$ dengan $F\text{-tabel}$. Jika $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$, maka hipotesis alternatif diterima.

BAB IV

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Responden

Propinsi Jawa Tengah memiliki peran realisasi penerimaan PBB Nasional sebesar 6% sampai dengan 6,5% dibawah Propinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Sama dengan beberapa propinsi di Pulau Jawa lainnya, sektor Pedesaan dan Perkotaan (SKB) merupakan sektor primadona di propinsi tersebut. Dalam periode 4 (empat) tahun mulai tahun anggaran 1996/1997 sampai dengan tahun anggaran 1999/2000, PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) kabupaten/kota untuk Propinsi Jawa Tengah secara nominal menunjukkan peningkatan. Adapun PDRB untuk setiap tahun selama periode tersebut berturut-turut adalah sebanyak Rp 50.305,5 juta pada tahun anggaran 1996/1997, pada tahun anggaran 1997/1998 sebanyak Rp 56.997 juta, tahun anggaran 1998/1999 sebanyak Rp 81.013,2 juta dan tahun anggaran 1999/2000 sebanyak Rp 101.373,3 juta.

Tingkat pertumbuhan atas dasar PDRB tersebut dari tahun anggaran 1996/1997 sampai dengan tahun anggaran 1999/2000 berkisar antara 13,30% sampai 42,14%. Rasio PBB terhadap PDRB selama periode tahun anggaran 1996/1997 sampai dengan tahun anggaran 1999/2000 menunjukkan angka yang menurun, yaitu berturut-turut sebesar 0,18% ; 0,18%; 0,16% dan 0,14%. Persentase terbesar terjadi pada tahun anggaran 1996/1997 dan 1997/1998 sebesar 0,18%, sedangkan persentase terkecil terjadi pada tahun anggaran 1999/2000 sebesar 0,14%. Perbandingan penerimaan PBB dan PDRB kabupaten/kota Propinsi Jawa Tengah selama periode 1996/1997 sampai dengan 1999/2000 selengkapnya dijelaskan sebagaimana tabel 4-1 berikut:

Tabel 4-1
 Realisasi Penerimaan PBB dan PDRB
 Daerah Kabupaten/Kota pada Propinsi Jawa Tengah
 Serta Pertumbuhannya Periode Tahun 1996/1997 s/d 1999/2000
 (dalam ribuan rupiah)

Tahun	Realisasi Penerimaan PBB ¹	PDRB	Persentase PBB terhadap PDRB	Pertumbuhan (%)	
				PBB	PDRB
1996/1997	88.974.742	50.305.546.410	0,18	-	-
1997/1998	102.429.267	56.997.067.910	0,18	15,12	13,30
1998/1999	133.473.430	81.013.284.440	0,16	31,31	42,14
1999/2000	143.862.370	101.373.300.000	0,14	7,78	25,13

Sumber : BPS, Nota Keuangan dan RAPBN 2001, diolah
¹) diluar insentif dan bagi rata (64,8%)

Provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas wilayah 3,25 juta ha, dengan jumlah penduduknya sampai dengan tahun 2001 sebanyak 31.063.818 jiwa. Sedangkan tingkat kesejahteraan penduduk berdasarkan nilai nominal Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita sebesar 4,36 juta rupiah pada tahun 2001.

Kota Surakarta merupakan salah satu kota di wilayah Jawa Tengah dan merupakan kota lintasan yang menghubungkan antara Jawa Tengah, Jawa Barat dengan Jawa Timur. Kota Surakarta terdiri atas 5 (lima) Kecamatan yaitu Kec. Pasar Kliwon, Kec. Laweyan, Kec. Jebres, Kec. Banjarsari dan Kec. Serengan. Data mengenai jumlah wajib pajak, jumlah pokok ketetapan dipaparkan dalam tabel 4-2 berikut:

TABEL 4-2
 JUMLAH WAJIB PAJAK DAN KETETAPAN PBB
 PER KECAMATAN DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2002

NO	KECAMATAN	JUMLAH WP	JUMLAH POKOK KETETAPAN PBB (RUPIAH)
1	Pasar Kliwon	17.295	1.631.429.577
2	Laweyan	18.558	3.521.421.523
3	Jebres	30.294	2.254.559.945
4	Banjarsari	36.562	2.942.430.254
5	Serengan	10.141	1.510.143.640
Jumlah		112.850	11.859.984.939

Sumber : KP.PBB Kota Surakarta

Tabel 4-2 menunjukkan jumlah wajib pajak PBB terbesar berada di Kecamatan Banjarsari yaitu sebanyak 36.562 wajib pajak, sedangkan jumlah wajib pajak terkecil adalah di kecamatan Serengan yaitu sebesar 10.141. Sedangkan bila ditinjau dari segi pokok ketetapannya jumlah wajib pajak terbesar berada di Kecamatan Laweyan yaitu sebesar Rp 3.521.421.523, serta pokok ketetapan paling kecil berada di wilayah Kecamatan Serengan. Dalam pelaksanaannya di Kota Surakarta banyak wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan khususnya PBB. Data berikut menyajikan mengenai tunggakan PBB selama 3 (tiga tahun) berturut turut mulai tahun 2000 sampai dengan 2002 berikut:

TABEL 4-3
JUMLAH TUNGGAKAN DAN REALISASI TUNGGAKAN PBB
KOTA SURAKARTA TAHUN 2000 S/D TAHUN 2002

NO.	TAHUN	JUMLAH TUNGGAKAN (000)	REALISASI TUNGGAKAN (000)	COLLECTION RATE (%)
1	2000	1.693.513	13.421	0,79
2	2001	2.520.727	88.972	3,53
3	2002	8.930.605	4.598.916	51,50
JUMLAH		13.144.845	4.701.309	35,77

Sumber : KP.PBB Kota Surakarta

Tabel 4-3 menunjukkan bahwa jumlah tunggakan pajak bumi dan bangunan serta realisasinya dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2002 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Demikian pula tingkat *collection ratenya* juga mengalami kenaikan Hal ini menunjukkan indikasi adanya wajib pajak yang kurang memperhatikan kewajiban pembayaran pajaknya.

Jika dilihat dari jumlah tunggakan, hasil penagihan dan prosentase keberhasilan penagihan tunggakan per bulan pada tahun 2001 dapat dijelaskan dalam tabel 4-4 berikut ini:

TABEL 4-4
JUMLAH TUNGGAKAN PBB, HASIL PENAGIHAN &
PERSENTASE KEBERHASILAN PENAGIHAN TUNGGAKAN PBB TAHUN 2001

BULAN	JUMLAH TUNGGAKAN (000)	JUMLAH YANG BERHSIL DITAGIH (000)	SISA TUNGGAKAN (000)	% KEBERHASILAN PENAGIHAN
Januari	4.759.754.502,-	50.925.947,-	4.708.828.555,-	1,07
Pebruari	4.708.828.555,-	142.686.152,-	4.566.142.403,-	3,00
Maret	4.566.142.403,-	178.299.538,-	4.387.842.865,-	3,75
April	4.387.842.865,-	183.518.269,-	4.204.324.596,-	3,86
Mei	4.204.324.596,-	211.058.911,-	3.993.265.685,-	4,43
Juni	3.993.265.685,-	273.035.898,-	3.720.229.787,-	5,74
Juli	3.720.229.787,-	277.252.611,-	3.442.977.176,-	5,82
Agustus	3.442.997.176,-	289.757.584,-	3.153.219.592,-	6,09
September	3.153.219.592,-	365.673.941,-	2.787.545.651,-	7,68
Oktober	2.787.545.651,-	644.596.785,-	2.142.948.866,-	13,54
Nopember	2.142.948.866,-	752.565.785,-	1.390.383.241,-	15,81
Desember	1.390.383.241,-	936.070.661,-	454.312.580,-	19,67

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak PBB Kota Surakarta

Tabel 4-4 tersebut menunjukkan bahwa jumlah tunggakan pajak PBB dari bulan ke bulan semakin berkurang, hal ini berarti semakin berkurang dan diikuti kenaikan persentase keberhasilan penagihan PBB. Namun demikian bila dilihat secara cermat semakin besar pula pajak bumi dan bangunan yang menunggak dan harus diupayakan secepat mungkin agar dilunasi oleh wajib pajak.

4.2. Profil Responden

Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak PBB Kota Surakarta yang terpilih melalui penentuan secara acak dari buku induk PBB Kota Surakarta tahun 2003. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 400 orang wajib pajak PBB. Profil responden dapat dilihat dari identitas responden yang meliputi tingkat pendidikan responden di lokasi obyek pajak PBB, serta status tempat tinggal responden.

TABEL 4-5
TINGKAT PENDIDIKAN RESPONDEN

Nomor	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1	Tidak tamat SD	-	-
2	SD	19	4,75
3	SLTP	46	11,5
4	SLTA	167	41,75
5	D3	14	3,5
6	S1	148	37
7	S2	6	1,5
8	S3	-	-
Total Responden		400	100

Sumber : diolah dari jawaban responden

Tabel 4-5 tersebut ditunjukkan bahwa jumlah responden yang berpendidikan paling banyak di tingkat SLTA dengan jumlah 167 responden atau 41,75 % sedangkan yang berpendidikan SD sebanyak 19 responden atau 4,75%, SLTP sebanyak 46 responden atau 11,5%, jenjang D3 sebanyak 14 responden atau 3,5%, jenjang S1 sebanyak 148 responden atau 37% serta jenjang pendidikan SD maupun S3 secara kebetulan tidak ada atau kosong.

TABEL 4-6
LAMA TINGGAL RESPONDEN
DI LOKASI OBYEK PAJAK

NO.	LAMA TINGGAL RESPONDEN	JUMLAH	%
1	Kurang dari 2 tahun	18	4,5
2	2 tahun sampai dengan 3 tahun	45	11,25
3	4 sampai dengan 6 tahun	106	26,5
4	Lebih dari 6 tahun	231	57,75
Jumlah		400	100

Sumber: diolah dari jawaban responden

Tabel 4-6 tersebut, menunjukkan bahwa jumlah responden yang bertempat tinggal di lokasi obyek pajak bumi dan bangunan lebih dari 6 tahun sebanyak 231 responden atau 57,75% dari total responden. Sedangkan yang lama bertempat tinggal

antara 4 tahun sampai dengan 6 tahun sebanyak 106 responden atau sebesar 26,5%, lama bertempat tinggal 2 tahun sampai dengan 3 tahun sebanyak 45 responden atau 11,25%, sisanya bertempat tinggal kurang dari 2 tahun atau sebesar 4,5%.

TABEL 4-7
STATUS TEMPAT TINGGAL RESPONDEN

No.	STATUS TEMPAT TINGGAL	JUMLAH	%
1	Kontrak	14	3,5
2	Hak Guna Usaha (HGU)	5	1,25
3	Hak Guna Bangunan (HGB)	32	8
4	Hak Milik (HM)	346	86,5
5	Lainnya	3	0,75
Jumlah		400	100

Tabel 4-7 tersebut diatas, terlihat bahwa jumlah responden yang berstatus tempat tinggal Hak Milik (HM) merupakan jumlah responden yang paling besar yaitu sebanyak 346 responden atau sebanyak 86,5%. Sedangkan Hak Guna Bangunan sebanyak 32 responden atau 8%, sedangkan sisanya kontrak 3,5%, hak guna usaha 1,25% dan lainnya 0,75%.

4.3. Uji Kualitas Data

4.3.1 Uji Validitas

Uji validitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana suatu alat ukur benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat tingkat signifikansi korelasi skornya setiap butir pertanyaan terhadap total skornya untuk masing-masing variabel. Hasil uji validitas selengkapnya disajikan dalam tabel uji validitas. Dari hasil perhitungan yang tersaji dalam tabel 4-8, terbukti bahwa semua item konstruk dinyatakan sah atau valid.

TABEL 4-8
HASIL UJI VALIDITAS

No	Variabel	Jumlah Item	Kisaran R_{hitung} Product Moment (Pearson)	Tingkat Signifikan
1	Kepatuhan WP (Y)	5	0,433 - 0,659	0,000
2	Sikap WP Terhadap Pembangunan Daerah (X1)	5	0,603 - 0,794	0,000
3	Sikap WP Terhadap Sanksi Denda PBB (X2)	4	0,648 - 0,748	0,000
4	Sikap WP Terhadap Pelayanan Fiskus (X3)	5	0,572 - 0,738	0,000
5	Sikap WP Terhadap Kesadaran Bernegara (X4)	5	0,526 - 0,701	0,000
6	Sikap WP Terhadap Kesadaran Perpajakan (X5)	6	0,314 - 0,646	0,000

Sumber : Output SPSS

Tabel 4-8 tersebut, terbukti bahwa keenam variabel penelitian baik variable terikat maupun variabel bebas terdapat kisaran R_{hitung} terendah 0,314 yang terletak pada variabel bebas keenam yaitu sikap WP terhadap kesadaran perpajakan (X6), dan R_{hitung} tertinggi sebesar 0,794 yang terletak pada variabel kedua yaitu variabel sikap wajib pajak terhadap pembangunan daerah (X2). Sedangkan menurut R_{tabel} Product Moment Pearson untuk $n = 400$ pada taraf signifikan 5% diperoleh angka R_{tabel} sebesar 0,098 (lampiran D)

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh seluruh variabel untuk R_{hitung} lebih besar daripada R_{tabel} (0,098). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel tersebut cukup valid.

4.3.2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya untuk mengetahui apakah instrumen dapat dipergunakan lebih lanjut atau tidak, maka kuesioner terlebih dahulu di ujicobakan untuk mengetahui tingkat

keandalannya. Jika alat ukur dipakai dua kali untuk mengukur gejala yang sama, hasil yang diperoleh konsisten, maka alat ukur tersebut dapat dikatakan reliabel. Dengan kata lain bahwa suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal bila jawaban seorang responden terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pada umumnya suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60. Hasil pengukuran reliabilitas menunjukkan bahwa Cronbach alpha untuk masing-masing variabel independen melebihi 0,60 sehingga semua variabel tersebut reliabel. Seperti dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 4-9
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien Alpha	Cronbach alpha	Keterangan
Kepatuhan (Y)	0,6390	0,60	Reliabel
Pemda (X1)	0,7440	0,60	Reliabel
Sanksi denda (X2)	0,6646	0,60	Reliabel
Pelayanan fiskus (X3)	0,6350	0,60	Reliabel
Kesadaran bernegara(X4)	0,6378	0,60	Reliabel
Perpajakan perpajakan (X5)	0,6397	0,60	Reliabel

Sumber : Outpus SPSS

4.4. Uji Asumsi Klasik

4.4.1. Uji Autokorelasi

Dalam model regresi diperlukan pengujian terhadap nilai uji Durbin-Watson (uji DW) untuk mengetahui terjadinya autokorelasi. Menurut Algifan (1997) dalam Sulud Kahono (2003), bahwa nilai uji DW ditetapkan sebagai berikut:

Range	Keterangan
Kurang dari 1,10	Ada korelasi
1,10 – 1,54	Tanpa kesimpulan
1,55 – 2,46	Tidak ada autokorelasi
2,47 - 2,90	Tanpa kesimpulan
Lebih dari 2,91	Ada autokorelasi

Atas dasar hasil analisis diperoleh jawaban seperti tabel 4-10 berikut ini:

TABEL 4-10
HASIL UJI DURBIN-WATSON (DW)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	sig. F Change	
1	.273 ^a	.075	.063	2.76530	.075	6.345	5	394	.000	1.711

a. Predictors: (Constant), TOTPAJAK, TOTPEMDA, TOTBERNE, TOTSAKSI, TOTFISKU

b. Dependent Variable: TOTPATUH

Nilai Durbin-Watson sebesar 1,711 terletak antara 1,55 – 2,46. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi, hal ini berarti model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi gejala autokorelasi

4.4.2. Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas dengan tujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebasnya. Multikolonieritas merupakan suatu kondisi dimana antara variabel independen yang terdapat dalam model penelitian memiliki hubungan yang sempurna atau mendekati sempurna yang ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi yang tinggi. Model untuk mendeteksi bebas tidaknya dari gejala multikolonieritas dengan melihat besarnya VIF (*Variance Inflation Factor*) yang berkisar pada angka 1 (satu) dan mendeteksi besarnya tolerance yang mendekati angka 1 (satu).

TABEL 4-11
NILAI TOLERANCE DAN VIF

Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	t	Sig.	Confidence Interval		Correlations			Linearity Statistic		
		B	Std. Error				Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	8.764	1.696		5.168	.000	5.430	12.098						
	TOTPEM	-.005	.038	-.007	-.139	.889	-.081	.070	.046	-.007	-.007	.889	1.125	
	TOTSAM	.114	.056	.107	2.034	.043	.004	.224	.154	.102	.099	.847	1.181	
	TOTFIS	.105	.052	.109	2.034	.043	.004	.207	.154	.102	.099	.820	1.219	
	TOTBEK	.147	.051	.143	2.891	.004	.047	.247	.154	.144	.140	.955	1.048	
	TOTPAK	.108	.047	.115	2.276	.023	.015	.201	.170	.114	.110	.921	1.086	

a. Dependent Variable: TOTPATUH

Tabel 4-11 tersebut diketahui bahwa, masing-masing variabel bebas menunjukkan nilai VIF berkisar antara angka 1 (satu), dan nilai tolerance yang mendekati hampir 1 (satu). Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa kelima variabel bebas dalam penelitian ini bebas dari gejala multikolinieritas.

4.4.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan terhadap pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan terhadap pengamatan lain tetap, maka dinamakan homoskedastisitas dan jika berbeda dinamakan heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil analisis bahwa tidak ada satupun variabel bebas yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel terikat nilai residu. Hal ini menunjukkan bahwa dari probabilitas signifikansi di atas tingkat 5% , dengan demikian model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas. Seperti dijelaskan dalam tabel 4-12 berikut:

TABEL 4-12
TABEL SIGNIFIKANSI HETEROSKEDASTISITAS

Keterangan	Signifikansi	Tingkat kepercayaan
Totpemda	0,670	5%
Totsanksi	0,149	5%
Totfiskus	0,305	5%
Totbernegara	0,180	5%
Totpajak	0,853	5%

Sumber : Output SPSS

4.4.4 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi antara variabel terikat dan variabel bebas keduanya memiliki distribusi normal atau mendekati normal atau tidak normal. Dari perhitungan nilai Z statistik untuk skewness bahwa nilai $Z_{hitung} < Z_{tabel}$, sehingga menunjukkan berdistribusi normal, seperti dalam tabel 4-13 berikut:

TABEL 4-13
HASIL UJI NORMALITAS

Keterangan	Skewness Statistik (Z hitung)	Z tabel
Totpatuh	-0,649	1,96
Totpemda	-0,716	1,96
Totsanksi	-0,253	1,96
Totfiskus	-0,978	1,96
Totbernegara	-0,617	1,96
Totpajak	-0,348	1,96

Sumber : Output SPSS

4.5. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ditunjukkan dari hasil analisis variabel bebas pada koefisien regresi dan signifikansi sebagai berikut:

Coefficients

Mod	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	t	Sig.	Confidence Interval		Correlations			Linearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part		Tolerance
1 (Constant)	8.764	1.696		5.168	.000	5.430	12.098					
TOTPE	-.005	.038	-.007	-.139	.889	-.081	.070	.046	-.007	-.007	.889	1.125
TOTSA	.114	.056	.107	2.034	.043	.004	.224	.154	.102	.099	.847	1.181
TOTFIS	.105	.052	.109	2.034	.043	.004	.207	.154	.102	.099	.820	1.219
TOTBE	.147	.051	.143	2.891	.004	.047	.247	.154	.144	.140	.955	1.048
TOTPA	.108	.047	.115	2.276	.023	.015	.201	.170	.114	.110	.921	1.086

a. Dependent Variable: TOTPATUH

Hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas kecuali sikap wajib pajak terhadap prioritas pembangunan daerah terbukti signifikan ($p = 0,05$). Untuk memperjelas dapat disusun tabel 4-14 sebagai berikut:

TABEL 4-14
KOEFSIEN REGRESI DAN SIGNIFIKANSI

NO	NAMA VARIABEL	KOEFSIEN REGRESI	SIGNIFIKANSI (P Value)	Keterangan
1	Sikap WP terhadap prioritas pembangunan daerah	-0,005	0,889	Tidak signifikan
2	Sikap WP terhadap sanksi denda PBB	0,114	0,043	Terbukti signifikan
3	Sikap WP terhadap pelayanan fiskus	0,105	0,043	Terbukti signifikan
4	Sikap WP terhadap kesadaran bernegara	0,147	0,004	Terbukti signifikan
5	Sikap Wp terhadap kesadaran perpajakan	0,108	0,023	Terbukti signifikan

Sumber : Output SPSS

4.6. Uji Hipotesis

Uji Hipotesis dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan melakukan uji signifikan parameter individual (uji statistik t). Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel penjelas atau independen secara individual mampu untuk

menjelaskan variabel dependen. Selain cara tersebut dapat dilakukan dengan uji signifikansi simultan (uji statistik F), yaitu untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Uji statistik t, dimana hipotesis nol (H_0) ditolak jika nilai $t_{hitung} >$ dari t_{tabel} , atau menerima hipotesis alternatif (H_a). Kemudian uji statistik F, hipotesis nol akan ditolak jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, atau menerima hipotesis alternatif. Tabel 4-15 berikut menunjukkan hasil perhitungan uji signifikansi parameter secara individual dan simultan sebagai berikut:

TABEL 4-15
UJI SIGNIFIKANSI PARAMETER INDIVIDUAL

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.764	1.696		5.168	.000
	TOTPEMDA	-.005	.038	-.007	-.139	.889
	TOTSAKSI	.114	.056	.107	2.034	.043
	TOTFISKU	.105	.052	.109	2.034	.043
	TOTBERNE	.147	.051	.143	2.891	.004
	TOTPAJAK	.108	.047	.115	2.276	.023

a. Dependent Variable: TOTPATUH

Sumber : Output SPSS

Tabel 4-15 diatas dapat diketahui tingkat signifikansi untuk masing-masing variabel bebas. Dari kelima variabel bebas tersebut yang dimasukkan dalam model regresi menghasilkan nilai yang signifikan $p < 5\%$, kecuali pada sikap wajib pajak terhadap prioritas pembangunan daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh masing-masing variabel bebasnya yaitu sikap wajib pajak terhadap sanksi denda PBB, sikap wajib pajak terhadap

pelayanan fiskus, sikap wajib pajak terhadap kesadaran bernegara dan sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan, kecuali variabel sikap wajib pajak terhadap prioritas pembangunan daerah yang tidak signifikan karena $p > 5\%$ yaitu 0,889.

Jika dibuat persamaan regresinya, maka:

$$Y = 8,764 - 0,005 \text{ pembangunan daerah} + 0,114 \text{ sanksi denda PBB} + 0,105 \text{ pelayanan fiskus} + 0,147 \text{ kesadaran bernegara} + 0,108 \text{ kesadaran perpajakan} + e$$

Atau dapat dijelaskan

$$Y = 8,764 - 0,005X_1 + 0,114X_2 + 0,105X_3 + 0,147X_4 + 0,108X_5 + e$$

Nilai t hitung untuk variabel bebas sikap wajib pajak terhadap prioritas pembangunan daerah menunjukkan nilai t hitung = -0,139. Sedangkan menurut tabel dengan $n = 400$ dalam taraf signifikan 5% diperoleh nilai t sebesar 1,960. Oleh sebab itu $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$, maka hipotesis pertama (H_1) tidak diterima yang berarti secara individual sikap wajib pajak terhadap pembangunan daerah tidak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB. Demikian nilai signifikansi 0,889 yang berarti berada di atas 5%, dengan demikian tidak signifikan.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan nilai t hitung yang positif dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, namun demikian sebaliknya hasil analisis dalam penelitian ini diperoleh nilai t hitung yang negatif dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa layanan pemerintah termasuk pembangunan infrastruktur perlu diupayakan dan ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya agar wajib pajak lebih dapat memanfaatkan dan mendayagunakan manfaat pembangunan daerah yang disediakan oleh pemerintah daerah semaksimal mungkin atas penyediaan sarana tersebut.

Sedangkan untuk variabel bebas sikap wajib pajak terhadap sanksi denda PBB diperoleh nilai $t_{hitung} = 2,034$ yakni lebih besar dari t_{tabel} . Dengan demikian berarti bahwa secara individual sikap wajib pajak terhadap sanksi denda PBB berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB. Demikian pula diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,043 < 0,05$ yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan. Kesimpulannya bahwa H_2 diterima.

Untuk variabel bebas ketiga yaitu sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus diperoleh nilai $t_{hitung} = 2,034 > t_{tabel}$. Hal ini berarti bahwa secara individual sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB. Demikian juga hasil signifikansi menunjukkan nilai $0,043 < 0,05$ yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan. Kesimpulannya H_3 diterima.

Untuk variabel bebas keempat yaitu sikap wajib pajak terhadap kesadaran bernegara diperoleh nilai $t_{hitung} = 2,891 > t_{tabel}$. Hal ini berarti bahwa secara individual sikap wajib pajak terhadap kesadaran bernegara berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB. Demikian juga hasil signifikansi menunjukkan nilai $0,004 < 0,05$ yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan. Kesimpulannya H_4 diterima.

Untuk variabel bebas kelima yaitu sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan diperoleh nilai $t_{hitung} = 2,276 > t_{tabel}$. Hal ini berarti bahwa secara individual sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB. Demikian juga hasil signifikansi menunjukkan nilai $0,023 < 0,05$ yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan. Kesimpulannya H_5 diterima.

TABEL 4-16
UJI SIGNIFIKANSI SIMULTAN (UJI F)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	242.603	5	48.521	6.345	.000 ^a
	Residual	3012.875	394	7.647		
	Total	3255.478	399			

a. Predictors: (Constant), TOTPAJAK, TOTPEMDA, TOTBERNE, TOTSAKSI, TOTFISKU

b. Dependent Variable: TOTPATUH

Sumber :output SPSS

Berdasarkan uji ANOVA pada tabel 4-16 diperoleh nilai F hitung sebesar 6,345. Sedangkan menurut F tabel pada tingkat signifikan 5% diperoleh angka 2,39. Dengan demikian $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka dapat disimpulkan bahwa menerima hipotesis alternatif. Dengan demikian persamaan regresi yang terbentuk dari variabel sikap wajib pajak terhadap pembangunan daerah, sikap wajib pajak terhadap sanksi denda PBB, sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus, sikap wajib pajak terhadap kesadaran benegara serta sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan secara bersama-sama dapat menerangkan variabel kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen.

4.7. Pembahasan dan Implikasi Hasil Penelitian

4.7.1. Sikap WP Terhadap Pembangunan Daerah

Menurut hipotesis penelitian ini, bahwa sikap wajib pajak terhadap pembangunan daerah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB di kota Surakarta. Berdasarkan analisis regresi linier, tingkat signifikansi variabel X_1 (Sikap WP terhadap pembangunan daerah) adalah sebesar $p = 0,889$. Atas dasar kriteria dimana H_0 diterima jika $p > 0,05$. Oleh karena nilai $p = 0,889 > p = 0,05$, maka

Ho diterima dan Ha ditolak. Dengan demikian bahwa sikap wajib pajak terhadap pembangunan daerah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB di kota Surakarta.

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel bebas sikap wajib pajak terhadap pembangunan daerah terbukti tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB di kota Surakarta. Sedangkan menurut hasil penelitian Bambang Suhardito (1996), Fraterneti (2001) dan Sulud Kahono (2003) menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap pembangunan daerah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB. Menurut Loekman Soetrisno (1994) menyatakan bahwa layanan pemerintah termasuk pembangunan infrastruktur akan mempengaruhi ketaatan wajib pajak dalam pembayaran PBB, khususnya wajib pajak perkotaan. Namun demikian sebaliknya jika pemerintah tidak merealisasikan hasil pendapatan dari sektor pajak termasuk PBB untuk pembangunan di daerah khususnya, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin berkurang.

4.7.2. Sikap WP Terhadap Sanksi Denda PBB

Menurut hipotesis penelitian, bahwa sikap wajib pajak terhadap sanksi denda PBB berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB di kota Surakarta. Berdasarkan analisis regresi linier, tingkat signifikansi variabel X_2 (Sikap WP terhadap sanksi denda PBB) adalah sebesar $p = 0,043$. Atas dasar kriteria dimana Ho diterima jika $p > 0,05$. Oleh karena nilai $p = 0,043 < p = 0,05$ maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian bahwa sikap wajib pajak terhadap sanksi denda PBB berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB di kota Surakarta.

Menurut hasil penelitian Bambang Suhardito (1996), Fraterneti (2001) dan Sulud Kahono (2003) menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap sanksi denda PBB berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB. Dengan demikian hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang sama dengan hasil penelitian terdahulu.

Sikap WP terhadap sanksi denda PBB telah terbukti berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan WP dalam pembayaran PBB di Kota Surakarta. Wajib pajak akan mematuhi aturan denda yang semakin meningkat bila PBB ditunda pembayarannya. Dengan demikian wajib pajak akan semakin dibebani denda atau sanksi yang dirasa semakin memberatkan bila tidak segera dilunasi atas hutang pajaknya.

Menurut hasil penelitian Bambang Suhardito (1996), Fraternesesi (2001), dan Sulud Kahono (2003) juga menyatakan bahwa sanksi denda PBB terbukti berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB. Dengan demikian wajib pajak dengan sanksi denda PBB yang sangat memberatkan, maka masyarakat selaku wajib pajak PBB akan berupaya mematuhi dengan berupaya membayar PBB agar tidak dikenakan sanksi, terutama sanksi administratif.

4.7.3. Sikap WP Terhadap Pelayanan Fiskus

Menurut hipotesis penelitian, bahwa sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB di kota Surakarta. Berdasarkan analisis regresi linier, tingkat signifikansi variabel X_3 (Sikap WP terhadap pelayanan fiskus) adalah sebesar $p = 0,043$. Atas dasar kriteria dimana H_0 diterima jika $p > 0,05$. Oleh karena nilai $p = 0.043 < p = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Dengan demikian bahwa sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB di kota Surakarta.

Sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus terbukti berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB di kota Surakarta. Pelayanan yang baik dan memuaskan terhadap wajib pajak menjadikan wajib pajak untuk mentaati kewajibannya dalam membayar PBB. Pelayanan fiskus tersebut diantaranya dalam menentukan PBB penetapan SPPTnya telah adil sesuai dengan yang seharusnya, juga fiskus memperhatikan terhadap wajib pajak dalam hal keberatan terhadap pengenaan pajaknya dan demikian pula akan selalu memberikan penyuluhan kepada wajib pajak di bidang perpajakan khususnya PBB. Jika fiskus memberikan pelayanan yang tidak memadai tentunya membawa konsekuensi dan daya tarik yang kurang dari wajib pajak. Oleh karena itu wajib pajak sudah semestinya diberikan layanan yang memadai agar terkesan dan tentunya tidak akan melalaikan kewajiban dalam membayar PBB. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB.

Menurut hasil penelitian Bambang Suhardito (1996), Fraterneti (2001) dan Sulud Kahono (2003) menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB. Dengan demikian hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang sama dengan hasil penelitian terdahulu.

4.7.4. Sikap WP Terhadap Kesadaran Bernegara

Menurut hipotesis penelitian, bahwa sikap wajib pajak terhadap kesadaran bernegara berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB di kota

Surakarta. Berdasarkan analisis regresi linier, tingkat signifikansi variabel X_4 (Sikap WP terhadap kesadaran bernegara) adalah sebesar $p = 0,004$. Atas dasar kriteria dimana H_0 diterima jika $p > 0,05$. Oleh karena nilai $p = 0,004 < p = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian bahwa sikap wajib pajak terhadap kesadaran bernegara berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB di kota Surakarta.

Sikap wajib pajak terhadap kesadaran bernegara terbukti berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB di kota Surakarta. Sebagai warga negara yang bijak maka kesadaran wajib pajak muncul bahwa dalam melaksanakan tugas pembangunan pemerintah tentu memerlukan dana. Sumber keuangan tersebut sebagian besar diperoleh tidak terlepas dari pemungutan pajak khususnya PBB. Demikian pula dengan pemungutan pajak diharapkan pemerintah dapat memperbaiki perekonomian secara nasional yang harapannya dapat menopang dalam menciptakan lapangan kerja. Dengan terciptanya lapangan kerja akan menekan tingkat pengangguran dan dampaknya juga akan meminimumkan tingkat kejahatan masyarakat secara luas.

Menurut hasil penelitian Sulud Kahono (2003) menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap kesadaran bernegara berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB. Dengan demikian hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang sama dengan hasil penelitian terdahulu.

4.7.5. Sikap WP Terhadap Kesadaran Perpajakan

Menurut hipotesis penelitian, bahwa sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB di kota Surakarta. Berdasarkan analisis regresi linier, tingkat signifikansi variabel X_5

(Sikap WP terhadap kesadaran perpajakan) adalah sebesar $p = 0,023$. Atas dasar kriteria dimana H_0 diterima jika $p > 0,05$. Oleh karena nilai $p = 0,023 < p = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian bahwa sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB di kota Surakarta.

Sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di kota Surakarta. Wajib pajak sadar bahwa dengan membayar pajak akan digunakan oleh pemerintah sebagai salah satu sumber dana pembiayaan pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah secara rutin. Demikian pula dengan sadar membayar pajak akan dapat digunakan oleh pemerintah sebagai dana umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah.

Menurut hasil penelitian Bambang Suhardito (1996) dan Sulud Kahono (2003) menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB. Dengan demikian hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang sama dengan hasil penelitian terdahulu.

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI

5.1. Kesimpulan

Populasi penelitian sebanyak 112.850 wajib pajak, sedangkan sampel penelitiannya sebanyak 400 responden yang tersebar di 5 (lima) kecamatan kota Surakarta. Sampel penelitian adalah wajib pajak PBB yang diambil secara acak yang terdaftar dalam buku Penerimaan PBB dan BPHTB tahun 2001.

Jumlah variabel penelitian sebanyak 5 (lima) variabel bebas dan 1 (satu) variabel tidak bebas. Kelima variabel bebas tersebut meliputi sikap WP terhadap prioritas pembangunan daerah, sikap WP terhadap sanksi denda PBB, sikap WP terhadap pelayanan fiskus, sikap WP terhadap kesadaran bernegara dan sikap WP terhadap kesadaran perpajakan. Satu variabel tidak bebas adalah kepatuhan WP dalam pembayaran PBB.

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai uji signifikansi parameter secara individual (uji t) menunjukkan $p < 5\%$ (*kecuali variabel sikap wajib pajak terhadap prioritas pembangunan daerah*) berpengaruh terhadap variabel terikatnya. Sedangkan hasil uji Anova diperoleh nilai F hitung sebesar 6,345 dan F tabel pada tingkat signifikan 5% diperoleh angka 2,39, maka $F_{hitung} > F_{tabel}$. Atas dasar pengujian hipotesis hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama:

- a. Sikap wajib pajak terhadap prioritas pembangunan daerah berpengaruh positif terhadap pembayaran PBB di Kota Surakarta.
- b. Sikap wajib pajak terhadap sanksi denda PBB berpengaruh positif terhadap pembayaran PBB di Kota Surakarta

- c. Sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap pembayaran PBB di Kota Surakarta.
- d. Sikap wajib pajak terhadap kesadaran bernegara berpengaruh positif terhadap pembayaran PBB di Kota Surakarta.
- e. Sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap pembayaran PBB di Kota Surakarta.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain :

1. Kuesioner yang diajukan kepada responden telah diupayakan pengujian sebelumnya (*pilot test*), namun demikian bisa jadi masih terdapat kesalahan *construct*, sehingga akan mengakibatkan hasil penelitian tidak dapat dicapai secara maksimal.
2. Kemungkinan jawaban dari responden ada yang tidak jujur, sehingga tidak menghasilkan jawaban secara akurat seperti yang diinginkan oleh peneliti.
3. Penelitian hanya dilakukan di wilayah kota Surakarta saja, sehingga lingkup penelitian ini sangat sempit. Dengan demikian hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk kota-kota lain di seluruh Indonesia.
4. Hasil penelitian yang menyatakan bahwa sikap wajib pajak terhadap pembangunan daerah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran PBB ini dimungkinkan hanya akan terjadi di sebagian kota saja, sehingga bagi penelitian berikutnya diharapkan lebih berhati-hati dalam mensikapi hal ini. Sedangkan hasil penelitian terdahulu menyimpulkan ada pengaruh yang positif.

5. Hasil uji reliabilitas untuk masing-masing *construct* diperoleh angka yang sebagian besar kurang dari 0,06 meskipun secara total lebih dari 0,06. Hal ini dapat menimbulkan tingkat reliabilitas yang kurang meyakinkan.

5.3. Implikasi

Implikasi penelitian ini meliputi:

1. Aparat perpajakan atau fiskus sebaiknya dalam melakukan pengenaan sanksi denda PBB benar-benar diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dan juga lebih meningkatkan kualitas pelayanannya kepada wajib pajak dengan sering memberikan penyuluhan kepada masyarakat wajib pajak, serta memberikan pelayanan yang memadai dan mudah terutama kepada wajib pajak yang mengajukan keberatan yang mungkin diakibatkan oleh kesalahan fiskus dalam menetapkan besarnya nilai jual obyek pajak, juga memberikan keringanan bagi wajib pajak yang tidak mampu untuk membayar pajak.
2. Pemerintah daerah hendaknya meningkatkan pembangunan infrastruktur yang perlu diupayakan dan ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya agar wajib pajak dapat memanfaatkan dan mendayagunakan pembangunan daerah yang disediakan oleh pemerintah daerah semaksimal mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

- Accounting Principles Board (APB), 1970, *Basic Concept and Accounting Principles Underlying Financial Statement of Business Enterprise*. New York. APB Statement of The Accounting Standard Board No.4.
- A. Tony Prasetiantono (kumpulan tulisan Guritno Mangkoesoebroto), 1994. “ *Kebijakan Ekonomi Publik di Indonesia: Substansi dan Urgensi*”. Jakarta. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Achmad Syaifudin, 1992. *The Effect of The 1983, Indonesian Tax on The Effective Tax Rate on Capital*. Blooming Com. Indiana University, Disertasi S3.
- Achmad Tjahjono, dan Muhammad Fikhri Husein, 2000. *Perpajakan* . Edisi Kedua. Yogyakarta. Penerbit UPP AMP YKPN.
- Andrew, Frank M., 1981. *A Guide For Selecting Statistical Techniques For Analyzing Social Science Data*. Second Edition, Michigan : Institute For Social Research. The University of Michigan.
- Arifin Sabeni dan Imam Ghozali, 1988. *Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan*, Yogyakarta. BPFE.
- B. Usman dan K. Subroto, 1980. *Pajak-Pajak Indonesia*, Cetakan Kedua . Jakarta. Yayasan Bina Pajak.
- Babbie, Earl, 1983. *The Practice of Social Research*. 3nd Ed. Belmont. California : Wadsworth Publishing Company.
- Badan Pengawas Keuangan (BPK), 1991. Panitia Kerja penyusunan Pedoman dan Program Audit Standar Bidang Anggaran pendapatan dan Belanja Negara. *Petunjuk pemeriksaan Atas Pajak Bumi dan Bangunan*. Jakarta. Proyek Penyempurnaan Auditing pemerintah I (BALAKA).
- Bambang Sudiby, 1985, *The Adequacy of CPAS Understanding of The Relative Seriousness of Alpha and Beta Risk in Statical Audit Sampling*. Lexington. Kentucky : The University of Kentucky Disertasi S3.
- Bambang Suhardito, 1996. *Pengaruh Faktor-Faktor Yang melekat pada Wajib Pajak Terhadap keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan*. Tesis Pascasarjana UGM .
- Bandura , 1977. “ *Social Learning Theory*”. Dalam Robbins (1996). *Perilaku Organisasi : Konsep, Kontroversi, Aplikasi*. Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta. Prenhallindo.

- Bambers, 1993. "*Opportunities in Behavioral Accounting Research*". Behavioral Research in Accounting" Vol.5 P. 1-29.
- Chairul Amachi Zandjani, 1992. *Perpajakan*. Jakarta. PAU-EK-UI dengan Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Direktorat PBB & BPHTB, 2001, "*Penerimaan PBB dan BPHTB tahun 1996-2000*" Departemen keuangan RI, Jakarta
- Eko Lasmana,1989. *Pengantar Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Balai Penerbit Universitas Tarumanegara.
- F.X. Yuwono Prawiro Setoto,1989, "*Tinjauan Aspek Mikro dan makro Kebijakan keuangan Negara di Indonesia*". Jurnal Keuangan dan Moneter. Vol.1 No.2. hal 63-86.
- Fratnesi, 2001. *Studi Empris Tentang Pengaruh Faktor-Faktor Yang Melekat Pada Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bengkulu*. Tesis pascasarjana universitas Diponegoro.
- Friedman, Laurence M.1984." American Law". London:W.W. Norton & Company. Dalam Erman Rajaguguk,1993. *Pembaharuan Hukum PJPT Kedua Dalam Era Globalisasi* .Surabaya: Kongres XII.
- Fuad Bawazier,1993. Key-notes Speaker pada: *Seminar peran pajak Dalam Peningkatan Ekspor*. Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.
- Guritno Mangkoesoewondo,1992: *Tantangan dan Prospek Pengumpulan Pajak Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan*. Dalam Seminar sehari tantangan dan prospek pembangunan Ekonomi Indonesia dalam Era PJPT II, Yogyakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Gajahmada.
- Hadi Sutrisno dan Seno Pamardiyanto (KO-Editor), 1991. *Analisis Butir Untuk Instrumen Angket, Tes dan Skala Nilai Dengan Basica*. Yogyakarta. Penerbit Andi Offset.
- Hellriegel, D.Slocom,J, dan Woodman R,. 1986 *Organizational Behavior*, New York:West.
- Imam Ghozali, 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Karsono Suryowibowo,1989."Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Prospekti". Jakarta. Jurnal Keuangan dan Moneter. Vol.1 No.2.

- Kiryanto, 1998. *Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian Intern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilan*. Tesis Program Pasca Sarjana Magister Akuntansi . Universitas Pajajaran Bandung (tidak dipublikasikan).
- La Midjan, 1994. *Pengaruh Budaya Terhadap Sikap Pimpinan Puncak dan Kepala Bagian Akuntansi Perusahaan "Go Public"*. Tesis Program Pasca Sarjana Universitas pajajaran Bandung (tidak dipublikasikan).
- Loekman Soetrisno, 1994. *Optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Perkotaan : Suatu Perspektif Sosiologis*. Jakarta. Direktorat Jendral Pajak. Diskusi terbatas "Penyempurnaan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan Serta Pemungutan Kembali Bea Balik Nama Tanah Atas Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- M. Suparmoko, 1992. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek Edisi.4* .Yogjakarta: BPFE.
- Mar'at, 1981. *Sikap Manusia Perubahan Serta pengukurannya*, Jakarta :Ghalia Indonesia.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (Ed), 1989, *Metode Penelitian Survey*. Edisi Revisi. Jakarta: LP3ES.
- Nunnaly, J.C. & Burestein, I.H, 1994. *Psychometric Theory*. Mc.Grawhill. Third Edition.
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta, BPFE UGM.
- Prawirosetoto, 1989 "Tinjauan Aspek Mikro dan Makro Kebijakan Keuangan Negara di Indonesia". *Jurnal Keuangan dan Moneter*. Volume 1 No.2 . Hal.63-86.
- R. Sa'ban, 1988. *Pajak Bumi di Indonesia Dari Masa Ke Masa : Sejarah Lahir dan Perkembangannya*, Jakarta. Penerbit Yayasan Bina Artha.
- R. Tobias Subekti, 1985. *Dasar-Dasar Perpajakan*. Jakarta. Penerbit Karunika. Universitas Terbuka.
- Rajaguguk, 1993. *Pembaharuan Hukum Memasuki PJPT Kedua Dalam Era Globalisasi*. Surabaya : Konggres XII Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia.
- Robbins, 1996. *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi*. Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta. Prenhallindo.
- S. Munawir, 2000, *Perpajakan* . Yogyakarta. Penerbit Liberty.

- Scheaffer, Richard L, William Mendewn Mendenhall dan Lyman Ott, 1979. *Elementary Survey Sampling*. 2nd Edition. New York. Zjohn Wiley and Sons.
- _____, 1983, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta, Sekretariat Negara RI.
- _____, 1985. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985. Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)*. (Lembaran Negara Nomor 68 Tahun 1985. Penjelasan dalam Lembaran Negara Nomor 312) , Jakarta. Sekretariat Negara RI.
- _____, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang pajak Bumi dan Bangunan*. Jakarta. Sekretariat Negara RI.
- _____, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan* . Jakarta. Sekretariat Negara RI.
- _____, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah..* Jakarta. Sekretariat Negara RI.
- Singgih Santoso, 2000. *SPSS. Mengolah Data Secara Profesional*. Jakarta. Penerbit PT. Elex Media Komputindo. Kelompok Gramedia.
- Sulud Kahono, 2003. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Studi Empiris di Wilayah KP.PBB Semarang*. Tesis Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Sugandhan Dann, 1992. *Pengantar Administrasi Negara*, Jakarta. Intermedia.
- Suparmi, 1986. *Dampak Penggantian Ipeda dengan PBB Terhadap Pemerintah dan Beban Wajib Pajak*. Yogyakarta. Tesis Program Pasca Sarjana UGM.
- Suroso Imam Zadjuli, 1995. *Dinamika Ekonomi Indonesia Dari Masa Ke Masa* . Surabaya. Universitas Airlangga. Pidato Pengukuhan Guru Besar.
- Suparmoko, 1992. *"Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek"* Edisi 4 Yogyakarta. Penerbit BPF. Universitas Gadjah Mada.
- Tony Prasetyanto (Ed), 1994. *"Kebijakan Ekonomi Publik di Indonesia : Substansi dan Urgensi"* Kumpulan Tulisan Dr.Guritno Mangkoesobroto. Jakarta. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.

Undang- Undang Dasar 1945, Jakarta. Sekretariat Negara RI.

Zaki Baridwan, 1992. *Peranan Penelitian Dalam Pengembangan Profesi dan Disiplin Akuntansi Memasuki Abad ke-21*. Yogyakarta. Procceding Konvensi Nasional Akuntansi Ke-2. Ikatan Akuntan Indonesia .